ISSN 2962-4177

Lensa Pembangunan

BULETIN

EDISI 4 OKTOBER - DESEMBER 2025

DIVERSIFIKASI EKONOMI KALTARA MENUJU EKONOMI HIJAU, BIRU DAN SIRKULAR



ISSN 2962-4177



OFFICIAL SOCIAL MEDIA

BAPPEDA DAN LITBANG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BappedadanLitbang Prov.Kalimantan Utara
@Bappedalitbangkaltara
bappedalitbang.kaltaraprov.go.id
Bappedalitbangkaltara

TAJUK



Seraya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kehendak-Nya, Buletin Lensa Pembangunan ini bisa tersaji di hadapan Anda, para pembaca budiman. Di edisi keempat tahun 2025, Buletin Lensa Pembangunan akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar perencanaan dan inovasi daerah di Kalimantan Utara serta berbagai informasi lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Edisi kali ini Lensa Pembangunan hadir dengan topik utama Diversifikasi Ekonomi Kaltara Menuju Ekonomi Hijau, Biru, dan Sirkular. Kalimantan Utara terus memperkuat orientasi pembangunannya menuju ekonomi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Tantangan perubahan iklim, kebutuhan efisiensi sumber daya, serta tuntutan untuk memperluas basis ekonomi daerah membuat pemerintah daerah mengambil langkah strategis melalui pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular.

Tidak ketinggalan, redaksi akan menyajikan beberapa liputan kegiatan seperti dialog dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman mendalam di bidang ekonomi biru, hijau dan sirkular, liputan Rakor Bappeda Se-Indonesia serta Rakor Bappeda dan Litbang Se-Kalimantan Utara.

Jangan lewatkan pula artikel inovasi derah serta rubrik jelajah yang akan membuka wawasan baru bagi pembaca sekalian.

Akhir kata, semoga buletin ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Selamat membaca.



Mochamad Sarkawi, S.Hut.M.Eng
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LENSA PEMBANGUNAN

PENGARAH
Gubernur Kalimantan Utara
Wakil Gubernur Kalimantan Utara

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

PENASEHAT REDAKSI
Kepala Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

EDITOR
Linda Marlisa

PENULIS ARTIKEL
Tim Penulis

DESAIN GRAFIS
Cristove Dismond, Ady Setiawan

SEKRETARIAT
Muhammad Roja Fajari, Jeri Markelius
Dewi Erisna Utami

ALAMAT REDAKSI
Jl. Agathis, Gedung PUPR-PERKIM Lt. 4
Tanjung Selor - Kalimantan Utara



BULETIN LENSA PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI

TOPIK UTAMA

DIVERSIFIKASI EKONOMI KALTARA MENUJU EKONOMI HIJAU, BIRU, DAN SIRKULAR 7

DIALOG TOKOH

RUKISAH, S.PI., MP., PH.D - WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAN, PERENCANAAN DAN KERJASAMA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN)
MENYELAMATKAN LAUT, MENGHIDUPKAN EKONOMI BIRU DI KALIMANTAN UTARA 18

DR. DIDI ADRIANSYAH, S.T.P.,M.M, - REKTOR UNIVERSITAS KALTARA
MEMBANGUN KALTARA DENGAN PRINSIP EKONOMI HIJAU DAN SIRKULAR 24

LIPUTAN KEGIATAN

BAPPEDA SE-INDONESIA PERKUAT SINERGI PERENCANAAN DAERAH 30
PLATFORM SDGS KU : WADAH KOLABORASI PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH 32
REFLEKSI RAKOR BAPPEDA DAN LITBANG SE KALTARA TAHUN 2025 38
COACHING CLINIC 7 IMPLEMENTASI STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA 42
BENUANTA FEST 2025 JADI PANGGUNG PENGHARGAAN BAGI INOVATOR TERBAIK KALTARA 44
OPTIMALISASI ANJAB DAN ABK DI BAPPEDA & LITBANG 48
KALTARA PERANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 52

INOVASI DAERAH

SMART-SENSE SOLUSI INTEGRASI UNTUK EFISIENSI ENERGI 59
SADAR LAUT (SISTEM ASISTEN DATA DAN REFERENSI PERIKANAN LAUT) 60
ZIKA : DARI TANAH MASAM MENUJU SWASEMBADA PANGAN 61

POTRET RUANG

MOBILITAS BERKELANJUTAN: MENYONGSONG KONEKTIVITAS HIJAU MENUJU 2045 62

SEKILAS INFO

INFORMASI SINGKAT KEGIATAN BAPPEDA DAN LITBANG 66

JELAJAH

JELAJAH SANTAI DI HUTAN PINUS TIDENG PALE 68

MUATAN LOKAL

MENGENAL TOKOH *URBAN LEGEND* DARI KALTARA (BAGIAN 3) 70

#KALTARADIHATI

INDONESIA EMAS 2045

bangga kalimantan utara BerAKHLAK

"MENJADI POROS EKONOMI HIJAU BUKAN CUMA SLOGAN. INI LANGKAH NYATA MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BERSIH DAN BERDAYA SAING GLOBAL."



DR. H. ZAINAL A PALIWANG, S.H., M.HUM
GUBERNUR



DIVERSIFIKASI EKONOMI KALTARA MENUJU EKONOMI HIJAU, BIRU, DAN SIRKULAR



Kalimantan Utara terus memperkuat orientasi pembangunannya menuju ekonomi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Tantangan perubahan iklim, kebutuhan efisiensi sumber daya, serta tuntutan untuk memperluas basis ekonomi daerah membuat pemerintah daerah mengambil langkah strategis melalui pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkenalkan ketiga pendekatan ekonomi ini pada gelaran SIED EXPO 2024, sebuah forum pembangunan yang mengusung tema Strategi Pembangunan Kalimantan Utara Melalui Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. Melalui SIED EXPO, pemerintah menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada efisiensi sumber daya, perlindungan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Ketiga pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan menjadi bagian penting dalam menyusun

arah pembangunan jangka menengah daerah. Lebih jauh lagi, komitmen ini juga tercermin dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025–2029, yang telah menetapkan Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru sebagai indikator sasaran pembangunan yang secara langsung mengukur kemajuan transformasi ekonomi berkelanjutan di tingkat daerah.

Ekonomi Hijau: Pembangunan Kaltara Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Konsep ekonomi hijau lahir dari kegelisahan dunia atas model pembangunan lama yang selama puluhan tahun terlalu mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi memang meningkat, tetapi mengorbankan kualitas lingkungan, kesehatan sosial, dan kesejahteraan jangka panjang. Kerusakan hutan, pencemaran air, polusi udara, penipisan sumber daya, hingga ancaman perubahan iklim menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan.

Di titik inilah ekonomi hijau muncul sebagai paradigma baru yang menawarkan pendekatan pembangunan yang jauh lebih seimbang dan bertanggung jawab. Pada dasarnya, ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi dilakukan dengan cara yang mengurangi risiko lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ekonomi hijau memprioritaskan efisiensi sumber daya, penggunaan energi bersih, perlindungan keanekaragaman hayati, serta modernisasi industri yang tidak boros energi maupun material. Inilah yang membuat ekonomi hijau sangat relevan untuk era sekarang, karena ia menempatkan manusia, alam, dan pertumbuhan ekonomi sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.



Dalam kerangka ekonomi hijau, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fondasi sistem pembangunan. Pilar lingkungan menekankan pentingnya menjaga daya dukung bumi melalui pemanfaatan energi bersih, pengurangan polusi, konservasi hutan, pengelolaan sampah yang bijak, dan perlindungan ekosistem. Pilar ekonomi menegaskan bahwa pembangunan tetap harus menghasilkan pertumbuhan, membuka peluang usaha, memperkuat industri domestik, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, namun dilakukan dengan cara yang efisien dan rendah emisi.

Sementara itu, pilar sosial memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan; bahwa kesetaraan, kesehatan, kualitas hidup, serta partisipasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga pilar ini bekerja bersama-sama. Tidak ada ekonomi hijau jika pertumbuhan ekonomi justru menyebabkan kerusakan lingkungan. Tidak ada ekonomi hijau jika masyarakat tidak memperoleh kesejahteraan sosial yang layak. Dan tidak ada ekonomi hijau jika lingkungan dijaga namun kesejahteraan ekonomi masyarakat diabaikan. Seluruh aspek berjalan secara harmonis sebagai satu kesatuan yang utuh.

Bagi Kalimantan Utara, konsep ekonomi hijau menjadi semakin penting karena provinsi ini memiliki modal ekologis sekaligus tantangan lingkungan yang signifikan. Lahan hutan yang masih luas menjadi penopang alami penyerap karbon, sementara potensi energi terbarukan seperti tenaga air dan tenaga surya menjadikan Kaltara sebagai kandidat utama pusat energi bersih Indonesia.

Namun pada waktu yang sama, provinsi ini tidak lepas dari risiko perubahan iklim berupa banjir, kekeringan, perubahan cuaca ekstrem, hingga ancaman degradasi lahan yang dapat menghambat pembangunan jangka panjang. Karena itu, penerapan ekonomi hijau bukan sekadar slogan, tetapi kebutuhan mendesak untuk





Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, meninjau fasilitas penyimpanan LNG PLTMG Gunung Belah Tarakan. Fasilitas ini menjadi langkah konkret mendukung transisi menuju energi bersih dan efisien.

memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan konsisten dengan kemampuan alamnya.

Dalam konteks perkembangan daerah, pemerintah provinsi mulai mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau melalui pembangunan industri yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam mentah, tetapi memanfaatkan energi bersih sebagai pendorong pertumbuhan. Hal ini terlihat dari pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning – Mangkupadi, kawasan industri pertama di Indonesia yang dirancang untuk beroperasi dengan energi rendah karbon.

Energi yang digunakan di kawasan ini akan berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan, sehingga industri-industri yang beroperasi di dalamnya dapat meminimalkan emisi dan memastikan proses produksinya selaras dengan prinsip ekonomi hijau. Kehadiran KIHI bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga simbol komitmen bahwa Kaltara ingin tumbuh melalui industri modern yang ramah lingkungan.

Di sektor energi, pembangunan PLTA Kayan menjadi salah satu langkah berani Kaltara dalam menggeser sumber energi dari fosil menuju energi terbarukan. Dengan memanfaatkan arus sungai besar sebagai sumber listrik hijau, provinsi ini tidak hanya memperkuat keamanannya sendiri, tetapi juga memasok energi bagi jaringan industri nasional. Energi bersih inilah yang kelak menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi hijau di Kaltara. Selain PLTA, penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terus diperluas terutama untuk wilayah perdesaan, kepulauan, dan perbatasan yang membutuhkan akses energi tanpa menambah beban karbon.



PLTS Desa Tepian di Kecamatan Sembakung yang berasal dari bantuan Kementerian ESDM

Pilar lingkungan ekonomi hijau juga tercermin dalam upaya perlindungan hutan sebagai aset karbon dan sumber kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah terus memperkuat program rehabilitasi lahan kritis, mencegah kebakaran hutan, melindungi kawasan konservasi, dan mengembangkan perhutanan sosial agar masyarakat dapat mengelola hutan secara berkelanjutan.

Dengan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hasil hutan bukan kayu, ekonomi lokal dapat tumbuh tanpa harus membuka hutan baru. Langkah ini bukan hanya memberi manfaat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi sekaligus sesuai dengan tiga pilar ekonomi hijau.Tidak hanya berhenti pada energi dan kehutanan, Kaltara juga mulai mengembangkan pertanian berkelanjutan untuk memastikan bahwa produksi pangan tidak merusak lingkungan sekaligus memberikan pendapatan yang stabil bagi petani.

Praktik pertanian organik, penggunaan pupuk ramah lingkungan, irigasi hemat air, dan teknologi pertanian modern menjadi bagian dari strategi untuk menghadirkan pertanian yang produktif namun tetap rendah emisi. Pertanian berkelanjutan tidak hanya menjaga kualitas tanah dan air, tetapi juga mengurangi beban karbon sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.


Pupuk Kompos

Pengelolaan sampah menjadi elemen penting lainnya dalam perjalanan menuju ekonomi hijau. Pemerintah mendorong masyarakat untuk memilah sampah, memperkuat bank sampah, meningkatkan fasilitas daur ulang, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui industri daur ulang dan UMKM pengolahan limbah ramah lingkungan.

Keseluruhan langkah ini memperlihatkan bahwa ekonomi hijau bukan hanya konsep abstrak, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata dan program yang saling berkaitan. Pemerintah Provinsi Kaltara, melalui arah kebijakan dalam RPJMD 2025–2029, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan prinsip rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan ekologis, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan holistik ini, Kaltara sedang membangun masa depan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga aman secara lingkungan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui potensi besar energi terbarukan, kekayaan ekologis, dan komitmen pemerintah daerah, Kaltara memiliki peluang untuk menjadi contoh nasional dalam implementasi ekonomi hijau.

Transformasi menuju pertumbuhan rendah karbon dan berwawasan lingkungan ini adalah bukti bahwa pembangunan yang cerdas adalah pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara alam, ekonomi, dan manusia. Dengan semangat itu, ekonomi hijau bukan hanya pilihan, tetapi jalan terbaik menuju masa depan Kaltara yang lebih berkelanjutan dan sejahtera.

Ekonomi Biru: Pemanfaatan Potensi Laut yang Berkelanjutan

Gagasan mengenai ekonomi biru sesungguhnya lahir dari sebuah kegelisahan besar, laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ikan semakin sulit ditemukan, pesisir tergerus abrasi, mangrove hilang sedikit demi sedikit, dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut justru sering menjadi kelompok paling rentan.

Kondisi inilah yang mendorong komunitas global pada awal 2010-an memperkenalkan konsep ekonomi biru, sebuah pendekatan baru yang


Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang melakukan penanaman Mangrove For Coastal Resilience (M4CR) bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan Lead Enviromental Specialist For Indonesia and Timor Leste and Pacific Word Bank, Franka Braun di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. (Foto : DKISP)

memandang laut bukan sebagai ruang yang tak terbatas untuk dieksploitasi, tetapi sebagai aset yang harus dijaga agar tetap produktif untuk generasi masa depan. Dunia mulai menerima kenyataan bahwa laut yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Tanpa itu, kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan planet menjadi taruhannya.

Indonesia, sebagai negara bahari, menyambut pendekatan ini dengan serius. Laut bukan hanya wajah negeri, tetapi juga nafkah bagi jutaan keluarga. Di Kalimantan Utara, yang dianugerahi garis pantai panjang, perairan kaya biota, serta ekosistem mangrove yang luas, ekonomi biru bukan sekadar konsep kebijakan ia adalah napas kehidupan masyarakat pesisir.

meningkat, akses pendidikan dan kesehatan lebih baik, serta perempuan pesisir mendapatkan peran yang lebih besar. Keempat, tata kelola laut harus kuat. Perencanaan ruang laut yang jelas, pengawasan yang efektif, dan kerja sama antar pihak adalah prasyarat mutlak.

Kelima, ekonomi biru juga merupakan upaya menjawab perubahan iklim. Mangrove, padang lamun, dan rawa pesisir adalah "paruparu biru" yang mampu menyerap karbon dalam jumlah jauh lebih besar daripada hutan daratan. Inilah fondasi yang memastikan laut tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Bagi Kalimantan Utara, ekonomi biru adalah peluang besar. Rumput laut yang tumbuh subur di perairannya menjadi tumpuan ekonomi banyak keluarga. Pelabuhan



Padang Lamun



Persemaian mangrove di dalam tambak (Pulau Piking)

Ekonomi biru berdiri di atas beberapa pilar yang saling menguatkan. Pilar-pilar ini membantu memastikan bahwa aktivitas ekonomi di laut tetap sejalan dengan kelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan manusia. Pertama, laut harus dikelola secara berkelanjutan. Penangkapan ikan perlu mengikuti batas daya dukung, kawasan konservasi harus dipertahankan, dan ekosistem penting seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove harus dijaga.

Kedua, kegiatan ekonomi di laut, baik perikanan, budidaya, maupun pariwisata harus produktif namun rendah emisi. Teknologi yang efisien, ramah lingkungan, dan berbasis inovasi menjadi kunci. Ketiga, masyarakat pesisir tak boleh tertinggal. Mereka adalah penjaga laut yang sebenarnya. Ekonomi biru memastikan pendapatan mereka perikanan dan rantai logistik terus diperkuat agar ikan-ikan dari Kaltara dapat memiliki nilai lebih tinggi. Di banyak desa pesisir, wisata bahari perlahan tumbuh sebagai ruang baru untuk menambah pendapatan masyarakat.

Sementara itu, mangrove yang membentang luas dari delta hingga pesisir utara Kaltara menjadi benteng alami terhadap abrasi dan badai. Lebih jauh lagi, mangrove ini adalah penyerap karbon biru yang sangat besar, kontribusi penting bagi Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim.

Dewasa ini, seluruh upaya ini dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis melalui Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) yang mulai digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

IBEI membantu pemerintah daerah melihat gambaran lengkap tentang bagaimana laut dikelola dan dimanfaatkan. Indeks ini terdiri dari 44 indikator yang tersebar dalam lima kelompok besar. Setiap indikator ibarat potongan cerita yang bersama-sama menggambarkan kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakatnya.

Indikator ekonomi mencatat berapa besar produksi perikanan, bagaimana nilai tambah dihasilkan, seberapa modern armada nelayan kita, dan sejauh mana hilirisasi hasil laut berjalan. Indikator ekologi berbicara tentang terumbu karang yang sehat, mangrove yang terjaga, lamun yang tumbuh subur, kualitas air laut, hingga sejauh mana upaya konservasi ditempuh. Indikator sosial mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir: pendapatan nelayan, akses mereka pada fasilitas kesehatan dan pendidikan, peran perempuan, dan tingkat kemiskinan pesisir.

Indikator tata kelola menilai apakah perencanaan ruang laut sudah berjalan, pengawasan efektif, data kelautan tersedia, dan kolaborasi antar pihak berjalan dengan baik. Terakhir, indikator perubahan iklim menggambarkan seberapa besar emisi dari sektor kelautan, berapa banyak karbon yang diserap mangrove dan lamun, serta bagaimana kesiapan pesisir dalam menghadapi ancaman seperti banjir rob dan kenaikan permukaan laut. Empat puluh empat indikator ini bukan sekadar angka. Mereka adalah cermin yang membantu kita melihat apa yang sudah baik, apa yang harus diperbaiki, dan ke mana arah pembangunan kelautan kita seharusnya dibawa.

Ekonomi biru mengajarkan kita satu hal penting, laut bukan hanya ruang geografis, melainkan ruang kehidupan. Ia memberi makan, memberi pekerjaan, memberi perlindungan, bahkan memberi identitas bagi masyarakat pesisir. Karena itu, membangun ekonomi biru bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama. Dari nelayan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas semua memiliki peran menjaga laut tetap sehat.

Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nasional bahkan regional dalam pengelolaan ekonomi biru. Dengan perpaduan laut yang kaya, masyarakat pesisir yang kuat, serta komitmen pemerintah melalui RPJMD, Kaltara berada di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih lestari. Laut yang dijaga hari ini akan menjadi warisan terbaik bagi anak cucu kita. Itulah ruh dari ekonomi biru: mengambil secukupnya, merawat sepenuh hati, dan mengembalikan lebih banyak daripada yang kita ambil.

Ekonomi Sirkular : Mengubah Limbah Menjadi Peluang Baru

Dunia kini bergerak menuju cara pikir baru dalam mengelola sumber daya. Setelah sekian lama terbiasa dengan pola “ambil–pakai–buang”, kita mulai menyadari bahwa model itu tidak lagi mampu menjawab tantangan lingkungan dan kebutuhan ekonomi masa depan. Dari kesadaran tersebut lahirlah konsep ekonomi sirkular, pendekatan yang mengajak kita melihat kembali siklus kehidupan sebuah produk dan memastikan tidak ada yang benar-benar berakhir sebagai sampah.

Dalam ekonomi sirkular, setiap material diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa diberi kesempatan kedua. Apa yang sebelumnya dianggap limbah ternyata masih memiliki nilai, selama kita mampu mengolah dan mengembangkannya dengan cara yang kreatif dan efisien. Itulah sebabnya pemerintah pusat menyusun peta jalan ekonomi sirkular, memperkuat industri daur ulang nasional, dan menargetkan pengurangan besar-besaran sampah plastik serta sampah yang tidak tertangani.



Pendekatan ini bukan hanya tentang mengurangi sampah, tetapi tentang menciptakan ekonomi baru, ekonomi yang tidak bergantung pada pengambilan

bahan baku terus-menerus dari alam. Ketika plastik bisa diolah kembali menjadi bahan baku industri, ketika limbah pertanian dapat menjadi energi, atau ketika pakaian bekas bisa diberi nilai baru, sebenarnya kita sedang membangun rantai ekonomi yang lebih tahan terhadap krisis sumber daya.

Kalimantan Utara, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan dinamika sosial yang terus berkembang, mulai menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam berbagai sektor. Di banyak daerah, bank sampah tidak lagi hanya menjadi tempat pengumpulan, tetapi pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui bank sampah, warga belajar memilah, memahami nilai material, dan memperoleh pendapatan tambahan dari hasil daur ulang.

Pemerintah daerah juga mulai mendorong adanya pusat daur ulang yang lebih modern, tempat plastik, kertas, logam, hingga kaca diproses kembali menjadi bahan siap pakai. Upaya ini secara nyata mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang usaha baru bagi para pelaku industri kecil dan menengah. Di sektor pertanian, limbah seperti jerami, tempurung, atau sisa produksi kini dimanfaatkan menjadi kompos, pakan ternak, atau bahkan energi biomassa. Industri pun diarahkan untuk memanfaatkan sisa produksi sebagai sumber inovasi, bukan hanya sebagai beban yang harus dibuang.

Tidak hanya itu, UMKM di Kaltara juga ikut bergerak. Banyak pelaku usaha mulai menggunakan kemasan ramah lingkungan, membuat kerajinan berbahan limbah, atau menghasilkan produk kreatif dari material daur ulang. Transformasi kecil ini, ketika dilakukan secara kolektif, akan menciptakan dampak besar bagi lingkungan dan ekonomi lokal.

Ekonomi sirkular mengubah cara pandang kita, sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata dapat menjadi peluang. Setiap botol plastik yang dikumpulkan, setiap sisa makanan yang diolah menjadi kompos, atau setiap limbah industri yang diubah menjadi produk baru adalah bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.



Pelampung Rumput Laut Ramah Lingkungan

Bagi Kalimantan Utara, ekonomi sirkular bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga pintu menuju ekonomi kreatif yang lebih inklusif. Masyarakat dapat terlibat, UMKM tumbuh, industri menjadi lebih efisien, dan alam mendapatkan kembali ruang bernapasnya. Pada akhirnya, ekonomi sirkular mengajarkan kita bahwa pembangunan tidak harus selalu meninggalkan jejak kerusakan. Dengan kreativitas, kemauan berubah, dan gotong royong, limbah dapat menjadi sumber nilai bahkan sumber harapan bagi generasi yang akan datang.

Meneguhkan Kaltara sebagai provinsi berkelanjutan dengan memasukkan indikator ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam RPJMD 2025–2029, Kalimantan Utara telah menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda resmi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau, biru, dan sirkular bukan sekadar wacana, tetapi menjadi arah pembangunan nyata yang akan terus dikawal melalui indikator yang jelas, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Jika ketiga pendekatan ini dijalankan secara konsisten dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Kaltara berpotensi besar menjadi contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Kaltara tidak hanya membangun ekonomi yang kuat, tetapi juga menjaga warisan alam untuk generasi mendatang.(NAR)

"UNTUK MEMASTIKAN **PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN,** KAMI MENDORONG **HILIRISASI SEKTOR UNGGULAN** SEPERTI INDUSTRI BERBASIS **SUMBER DAYA ALAM, PENGEMBANGAN ENERGI HIJAU,** SERTA MEMBANGUN **EKOSISTEM DIGITAL** YANG **INKLUSIF.**"

INGKONG ALA, S.E., M.SI
WAKIL GUBERNUR



KARBON BIRU

Potensi Pengembangan Karbon Biru di Kalimantan Utara

GIZ



Foto: Mangrove yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan (©GIZ/Karlina Kartika)

Karbon biru semakin mendapat perhatian global sebagai salah satu solusi iklim berbasis alam yang paling efektif dan berkelanjutan. Istilah ini merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan ekosistem rawa pasang surut *(saltmarsh)* yang memiliki kemampuan menyimpan karbon jauh lebih besar dibandingkan tipe ekosistem di daratan.

Gencarnya berbagai upaya strategis terkait mitigasi perubahan iklim, keberadaan ekosistem pesisir ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk menjaga keseimbangan iklim, tetapi juga untuk menopang kehidupan masyarakat pesisir melalui perlindungan pantai, sumber mata pencaharian, dan keanekaragaman hayati.

Namun, tekanan dari aktivitas manusia, pembangunan wilayah, dan degradasi lingkungan terus mengancam keberadaan ekosistem tersebut dalam menyimpan karbon. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan ekosistem karbon biru menjadi agenda strategis bagi pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim di dunia.

Perkembangan karbon biru di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia, sebagai negara dengan luas mangrove terbesar di dunia dan ekosistem pesisir yang sangat beragam, memiliki potensi karbon biru yang sangat besar. Pemerintah telah menempatkan ekosistem pesisir khususnya mangrove dan padang lamun dalam agenda strategis nasional melalui kebijakan restorasi mangrove, peta jalan rehabilitasi nasional, dan integrasi karbon biru ke dalam dokumen kebijakan iklim seperti NDC *(Nationally Determined Contribution).*

Selain itu, instrument kebijakan yang mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diatur dalam Perpres No.110 Tahun 2025 turut memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan emisi. Berbagai inisiatif riset dan pemetaan stok karbon biru juga semakin intensif dilakukan, termasuk pengembangan standar metodologi untuk proyek karbon berbasis mangrove.

Kalimantan Utara memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 3.500 km dan memiliki potensi yang besar dari ekosistem pesisir. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2023, Kaltara memiliki mangrove seluas 203.926 ha dan potensi habitat mangrove seluas 135.421 ha. Selain mangrove, tipe ekosistem pesisir yang berpotensi dalam karbon biru adalah lamun.

Ekosistem ini tidak seluas ekosistem mangrove, hanya memiliki luas sekitar 10 hektar dan terletak di wilayah Kabupaten Bulungan. Namun demikian, sama halnya yang terjadi di belahan dunia lain, eksistensi ekosistem ini mengalami tantangan dari alih fungsi lahan. Sebagian besar mangrove yang ada telah berubah fungsi menjadi tambak tradisional dengan udang windu sebagai komoditas utama.

Perbaikan tata kelola budidaya perikanan dan konservasi mangrove telah digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sejak 2015, isu tersebut semakin berkembang dan peran serta para pihak semakin meningkat. Berdasarkan kajian "Potensi Blue Carbon dan Strategi Pembangunan Menuju Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berkelanjutan di Kalimantan Utara" yang dilakukan GIZ di 2021, estimasi simpanan karbon bagian atas *(above ground biomass)* dari mangrove dan lamun sebesar 17.951.161,30 ton karbon.

Sedangkan secara khusus untuk ekosistem lamun, biomassa sedimen lebih besar dibandingan simpanan karbon atas dan bawah. Perubahan luasan pada ekosistem mangrove terjadi dari tahun ke tahun berimplikasi pada penurunan stok karbon. Hasil analisis citra menunjukkan bahwa penurunan luasan mangrove mulai berkurang pada periode 2016 hingga 2019. Aspek ekologi ini menjadi isu strategis dalam pengelolaan *blue carbon* di Kaltara.

Peningkatan kualitas ekosistem *blue carbon* dengan rehabilitasi mangrove dan lamun serta perlindungan terhadap ekosistem yang masih dalam kondisi baik (kerapatan tinggi) menjadi salah satu rekomendasi pengelolaan ekosistem *blue carbon* ke depan. Penegakan hukum dan pengelolaan kawasan merupakan bagian dari langkah perlindungan ekosistem *blue carbon.*

Di samping aspek ekologis, keterikatan masyarakat terhadap ekosistem *blue carbon* mengindikasikan isu strategis dari aspek sosial dan ekonomi. Beberapa diantaranya yang menjadi perhatian adalah persepsi dalam memandang mangrove dengan berbagai jasa ekosistem yang diperoleh masyarakat, kapasitas SDM dalam pengelolaan ekosistem mangrove dan lamun serta kesadaran untuk pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem mangrove.

Masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem mangrove dan lamun karena adanya keterikatan dengan sumber daya alam sekitarnya sejak lama. Upaya perlindungan yang dilakukan tidak hanya bertujuan secara ekologi tetapi menjadi langkah dalam mempertahankan sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Beberapa strategi pengembangan sosial ekonomi masyarakat diantaranya:

1. Pengembangan keterlibatan para pihak dalam konservasi/perlindungan ekosistem melalui sosialisasi program dan penyuluhan sehingga masyarakat mengetahui keberadaan area yang dilindungi beserta fungsinya dan mendukung pengelolaan kawasan.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan serta peran masyarakat dan lembaga lokal.
3. Fasilitasi pengembangan ekonomi lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
4. Pengelolaan lingkungan pesisir bersih berbasis masyarakat serta penataan kawasan sosial.
5. Program pendampingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat.

Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi penting dalam pengembangan potensi karbon biru di Kaltara. Pemerintah Provinsi Kaltara telah melakukan berbagai langkah strategis yang mendukung ekosistem karbon biru antara lain tersusunnya kebijakan daerah yang mendukung perbaikan tata kelola ekosistem mangrove dan lamun, termasuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), kawasan konservasi perairan di wilayah Binusan dan Pulau Sinelak Kabupaten Nunukan serta pencadangan kawasan konservasi perairan di Pulau Cermin Kabupaten Bulungan, rehabilitasi mangrove serta rencana strategis Delta Kayan Sembakung.

Inisiatif pemerintah daerah tersebut mendapat dukungan dari mitra pembangunan antara lain program M4CR yang fokus pada rehabilitasi mangrove, YLBA, Nasklim-GGGI serta GIZ. Sinergi dan harmonisasi program dari berbagai pihak menjadi kunci dalam memperkuat pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan serta mewujudkan potensi karbon biru yang optimal di Kalimantan Utara. (GIZ)



Foto: Ekowisata Mangrove Desa Setabu
(©GIZ/Afandi Ahmad)



MENYELAMATKAN LAUT, MENGHIDUPKAN EKONOMI BIRU DI KALIMANTAN UTARA

Di tengah desakan pembangunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir, laut Kalimantan Utara berada di persimpangan antara eksploitasi jangka pendek dan kelestarian jangka panjang. Bagaimana kondisi ekosistem pesisir Kalimantan Utara saat ini? Apa saja hambatan dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan? Dan bagaimana peran masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan tersebut? Berikut wawancara mendalam bersama Bapak Rukisah, S.Pi., MP., Ph.D (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan), yang memberikan gambaran utuh tentang peluang dan tantangan pengelolaan sumber daya kelautan di Kaltara.

Redaksi : Bagaimana Bapak melihat kondisi lingkungan laut dan pesisir di Kaltara saat ini baik dari sisi kualitas ekosistem maupun potensinya untuk pengembangan ekonomi biru?

Secara umum, kondisi lingkungan laut dan pesisir di Kalimantan Utara saat ini kalau boleh saya katakan sudah terjadi degradasi walaupun belum separah dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Ini terlihat dari aktifitas pengguna lingkungan laut dan pesisir masih produktif misalnya kegiatan tangkap, nelayan masih mampu menghasilkan hasil tangkapan yang lumayan yang terdistribusi ke beberapa *cold storage* di Tarakan.

Selain itu, dari kegiatan budidaya terutama tambak juga masih berproduksi walaupun hasilnya dari waktu ke waktu terjadi penurunan. Terjadinya penurunan ini akibat pemanfaatan mangrove yang tidak terkendali dan seperti kita pahami bahwa ekosistem mangrove itu menjadi habitat dari berbagai macam biota air, seperti ikan dan berbagai macam *crustacea* seperti udang dan kepiting.

Selain itu penurunan produksi juga diperparah dengan prilaku para petambak yang menggunakan bahan kimia, seperti *thiodan* untuk membunuh hama pengganggu, padahal bahan kimia tersebut tidak direkomendasikan penggunaannya pada tambak. Kegiatan budidaya yang lain yang juga menjadi potensi ekonomi luar biasa di Kaltara adalah budidaya rumput laut jenis *Kappaphycus alvarezii.*

Potensi pengembangan rumput laut ini sangat menopang untuk mengembangan ekonomi biru, karena pemanfaatannya berkelanjutan, dapat menciptakan lapangan kerja dan akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Dari data yang ada potensi rumput laut Kaltara kurang lebih 11.000 ton perbulan yang terdistribusi produksinya dari Tarakan sebesar 3000 – 4000 ton sedangkan Nunukan 6000 – 7000 ton.

Namun disisi lain, keberadaan kegiatan budidaya rumput laut menyisakan persoalan sampah terutama sampah plastik dimana sumber plastik ini berasal dari botol aqua yang dijadikan pelampung, akan mempengaruhi kebelanjutan

karena berdampak terhadap kesehatan ekosistem pesisir secara umum. Botol plastik yang terbuang ke perairan ada yang dimakan langsung oleh biota laut seperti penyu dll.

Sedangkan plastik yang melayang diatas permukaan laut akan mengalami penetrasi matahari, selanjutnya mencair menjadi bubur plastik dan terpragmentasi menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini akan masuk dalam rantai makanan yang prosesnya dikomsumsi oleh hewan renik seperti zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan kecil, ikan kecil dimakan oleh ikan besar yang akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Dan lambat laun akan mempengaruhi kesehatan manusia.

Redaksi : Apakah Bapak melihat adanya degradasi ekosistem pesisir?

Ya, secara kasat mata, sebenarnya sudah terjadi degradasi. Ini dapat di lihat dari trend produksi budidaya udang windu dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sebagai akibat dari pembabatan hutan mangrove yang tidak terkendali dan konversi mangrove untuk kepentingan lain. Padahal kita paham bahwa hutan mangrove merupakan habitat berbagai macam organisme baik fauna maupun flora. Mangrove menjadi tempat mencari makan, *feeding ground, nursery ground,* serta filter alami air laut sebelum didistribusikan ke dalam media pemeliharaan. Dari sisi hasil tangkap, terjadi penurunan ukuran dari hasil tangkapan ikan. Dulu, tahun 1990 an, kita masih bisa melihat ikan-ikan kipar di pasar ukuran yang besar sebesar piring tapi sekarang sangat jarang jenis ikan tersebut. Kalaupun ada ukuran kecil-kecil. Fenomena seperti ini menjadi indikator alami bahwa sudah terjadi degradasi ekosistem pesisir.

Redaksi : Apa tantangan utama dalam menerapkan prinsip ekonomi biru di Kaltara?

Pertama, literasi masyarakat. Banyak yang belum paham bahwa sampah plastik yang mereka buang ke laut akan kembali ke tubuh mereka sendiri.

Kedua, metode penangkapan ikan yang masih merusak seperti menggunakan racun atau alat tangkap yang tidak selektif. Bahkan ada yang masih pakai setrum listrik untuk menangkap ikan. Ini bukan hanya membunuh ikan target, tapi juga membuat ikan yang selamat jadi mandul akibat organ reproduksi rusak. Dampaknya, populasi ikan tak bisa pulih alias punah.

Ketiga, desakan ekonomi. Kadang, kerusakan terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena masyarakat terpaksa demi sesuap nasi, mereka merusak laut. Ini persoalan struktural yang harus diselesaikan dengan pendekatan holistik bukan hanya regulasi, tapi juga pemberdayaan.



Keempat, infrastruktur. Mayoritas kantong kemiskinan di Indonesia justru ada di pesisir padahal di sanalah potensi ekonomi terbesar berada. Infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan pendidikan di pesisir masih jauh tertinggal dibanding perkotaan.
Dan kelima, kemiskinan kultural. Sekitar 80% masyarakat pesisir tidak tamat sekolah. Mereka tak punya literasi pengelolaan sumber daya. Budaya menabung, perencanaan keuangan, atau pengelolaan berkelanjutan hampir tidak ada. Uang hasil melaut bisa mencapai 3 juta dalam seminggu, tapi habis dalam sehari untuk minum, judi, atau foya-foya. Padahal, potensi ekonominya besar, tapi pola pikir dan budayanya belum berubah.

Redaksi : Bagaimana dengan tata kelola dan kelembagaan?

Tata kelola dan kelembagaan yang diterapkan pada ekonomi biru adalah bagaimana memperkuat regulasi dan aturan terutama yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta mengintegrasikan antara lembaga yang terkait. Kemudian pengelolaan sumber daya perikanan dengan menerapkan sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota, berharap sistem ini dapat menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan. Pengembangan akuakultur sesuai potensi Kaltara yaitu budidaya rumput laut, udang windu, kepiting dan ikan bandeng. dan masih memungkinkan kawasan konservasi di perluas untuk menjaga plasma nutfah dari spesies yang ada. Dengan tata kelola dan kelembagaan yang baik implementasi ekonomi biru dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran berupa keberlanjutan sumberdaya, inkulusivitas dan peningkatan kesejahteran masyarakat pesisir dapat tercapai.

Redaksi : Menurut Bapak, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir?

Kami tiap tahun mengadakan kegiatan *coastal clean-up.* Kegiatan ini dilakukan dalam rangka bagaimana kita berperan dalam mengurai persoalan sampah yang ada di pesisir. Kegiatan *coastal clean-up* biasanya kami bekerjasam dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan serta marinir dan berharap masyarakat yang tinggal di daerah pesisir ikut terlibat, namun apa yang terjadi saat kita melakukan aksi tersebut, malah masyarakatnya hanya diam di rumah sambil merokok dan minum kopi tanpa ada kepedulian dan ikut bersama dengan kita. Hal ini terjadi karena tidak ada rasa simpati dan empati atau mungkin ketidaktahuan dari mereka bahwa dengan bersih-bersih pantai akan menjaga kesehatan ekosistem pesisir.

Oleh karenanya menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita jangan bosan-bosannya untuk mengedukasi, memberikan pelajaran dan selalu memotivasi kepada semua pihak terutama masyarakat yang berdomisili di pesisir agar jangan membuang sampah sembarangan.

Redaksi : Saat ini apakah sudah ada model ekonomi biru yang diterapkan di Kaltara?

Belum ada yang menjadi *best practice* atau rujukan. Ada inisiatif-inisiatif kecil dari kelompok masyarakat, tapi masih parsial. Ini tantangan kita bersama.
Apalagi sejak UU No. 32/2004, kewenangan pengelolaan pesisir dan laut dialihkan ke provinsi padahal masyarakat berada di kabupaten/kota. Akibatnya, terjadi *misalignment.* Di sektor kehutanan, ada UPTD yang menjembatani. Tapi di perikanan? Tidak ada. Ini kendala struktural. Padahal problem itu ada di kabupaten kota tapi kewenangan ada di provinsi, terjadi rentang kendali yang terlalu jauh, sehingga penyelesaian masalah lambat dan berlarut larut.



> Ekonomi biru bukan sekadar slogan. Ini soal komitmen bagaimana kita menjaga laut bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang. Karena laut yang sehat adalah fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Dan itu hanya mungkin jika semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi berjalan bersama.

RUKISAH

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAN, PERENCANAAN DAN KERJASAMA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Redaksi : Sektor apa saja yang paling potensial untuk dikembangkan dalam ekonomi biru di Kaltara?

Melihat potensi yang ada di Kaltara maka sektor ekonomi biru yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah budidaya rumput laut, udang windu, kepiting, dan ekowisata berbasis mangrove. Ketiga komoditas tersebut sangat layak untuk dikembangkan karena memenuhi prinsip ekonomi biru yaitu *sustainability* atau berkelanjutan, keseimbangan ekologi dapat dijaga karena dengan menjaga ekologi produksi dapat meningkat, dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan terakhir dapat melakukan diversifikasi produk dalam bentuk olahan yang dapat menambah nilai ekonomi.

Selain itu ekowisata mangrove juga punya nilai ekonomi tinggi dan dapat dikembangkan di Kaltara karena kita memiliki luasan mangrove yang terbesar di Indonesia. Dengan berbagai macam flora dan fauna yang ada di kawasan mangrove tersebut, menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa menjadi eduwisata, lembaga pendidikan dapat memanfaatkan areal untuk dapat melihat langsung biota yang ada.

Redaksi : Dalam konteks itu, bagaimana menurut Bapak peran kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mendorong ekonomi biru di Kalimantan Utara?

Ini yang saya sebut *triple helix:* pemerintah, kampus, dan swasta. Di luar sana, bahkan sudah ada *pentahelix* yang melibatkan media dan komunitas. Tapi di kita, bahkan *triple helix* saja belum berjalan optimal.

Di kampus, banyak ide, gagasan bahkan produk inovasi berupa prototipe. Namun berhenti disitu karena tidak di *takeover* oleh pihak swasta untuk mengembangkan lebih besar lagi dalam bentuk produksi massal. Misalnya *prototype* alat untuk

memanen rumput laut tanpa merusak struktur tanamannya.

Kenapa ini penting? Karena rumput laut seperti *Kappaphycus alvarezii, Eucheuma,* jadi andalan Kaltara, memiliki kandungan karaginan sebagai indikator kualitas. Kalau cara panennya asal tarik, karaginannya rusak, harganya turun.

Contoh lain misalnya kalau pemerintah mau melarang penggunaan botol plastik sebagai pelampung rumput laut itu bagus. Tapi harus disertai solusi pengganti. Misalnya, ajak kampus dan swasta mengembangkan pelampung ramah lingkungan bahkan bisa didesain warna-warni, dipasang lampu LED. Selain estetik, ini bisa jadi daya tarik ekowisata.



Sampah di Pesisir Pantai

Kenapa warna penting? Karena ikan punya preferensi warna. Ada yang suka hijau, biru, atau merah. Pemancing saja tahu itu umpannya disesuaikan dengan warna dan getaran yang disukai ikan target. Nah, ini menunjukkan bahwa pengelolaan laut harus berbasis sains, bukan asal tangkap.

Redaksi : Apakah riset di daerah seperti Kaltara sudah mendukung kebijakan ekonomi biru?

Jujur saja, masih banyak celah. Riset kita sering bersifat parsial ada yang cuma fokus pada aspek biologi, ada yang hanya ekologi, tapi jarang terintegrasi dalam satu studi komprehensif. Padahal, untuk memahami spesies seperti ikan lembek-lembek atau pepija, kita butuh data lengkap, di mana dia bertelur, jalur migrasinya, interaksinya dengan habitat mangrove, dan sebagainya.

Kalau tidak, kita seperti membiarkan spesies ini punah perlahan seperti dinosaurus. Dulu, ikan kipar mudah ditemukan di pasar-pasar. Sekarang? Langka. Itu akibat penangkapan tidak ramah seperti bom, racun, setrum yang menghancurkan ekosistem sekaligus generasi ikan berikutnya.

Kami di kampus sebenarnya sudah banyak melakukan riset dasar. Misalnya, ekstrak daun mengkudu untuk *enrichmen* pakan udang ternyata bisa menurunkan tingkat kematian hingga 50% dan meningkatkan pertumbuhan 53% atau pemanfaatan buah mangrove sebagai bahan *sunscreen* alami ini warisan lokal yang bisa dikembangkan.

Tapi semuanya masih di level laboratorium. Belum "membumi". Karena apa? Kurang dana, fasilitas terbatas, dan yang paling utama belum ada mekanisme kolaborasi yang menghubungkan riset dengan kebutuhan lapangan.

Redaksi : Lalu bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam mendorong kolaborasi ini?

Pemerintah harus jadi *enabler* bukan hanya pembuat aturan, tapi juga fasilitator kolaborasi. Misalnya, dengan menyediakan pendanaan untuk riset terapan yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat bukan hanya yang "kelihatan" langsung. Dana ini bisa kita dapatkan dari beberapa perusahaan yang mengeksploitasi sumberdaya alam untuk mengeluarkan dana berupa CSR *(Cooperate Social Responsibility).* Pemerintah bisa mengarahkan perusahaan untuk membantu membiayai riset-riset yang dibutuhkan daerah dan masyarakat.

Padahal, negara maju seperti Singapura, Jepang dan Korea justru maju karena investasi besar pada SDM dan riset dasar. Singapura tidak punya sumber daya alam, tapi SDM-nya unggul. Di sini, justru banyak kepala daerah yang lebih suka membangun

yang bersifat fisik karena hasilnya cepat terlihat daripada membangun sumberdaya manusia yang dampaknya baru terlihat 10–20 tahun kedepan.

Redaksi : Dalam konteks perubahan iklim, bagaimana ekonomi biru bisa jadi strategi adaptasi?

Dalam konteks perubahan iklm, ekonomi biru dapat menjadi strategi adaptasi dengan cara mendorong pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara *continue,* membangun ketahanan pangan masyarakat yang berdomisili di daerah pesisir dengan melakukan upaya diversifikasi usaha serta menjaga ekosistem baik itu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Ketiga ekosistem tersebut menjadi penyangga daratan dari gelombang besar atau tsunami, mencegah terjadinya intrusi air laut, mencegah abrasi dan paling penting lagi adalah dapat menyerap karbon, serta penghasil oksigen. Kasus tsunami di Aceh memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua bahwa begitu pentingnya ekosistem mangrove yang tumbuh di daerah pesisir, bahwa pada saat kejadian di Aceh daerah yang eksositem mangrovenya masih bagus relatif tingkat kerusakannya sangat ringan jika dibandingkan daerah yang sama sekali tak memiliki hutan mangrove.

Redaksi : Jika Bapak diminta memberi tiga rekomendasi utama untuk ekonomi biru di Kaltara lima tahun ke depan, apa rekomendasi Bapak?

Pertama: literasi dan edukasi masyarakat. Tak ada gunanya bikin aturan kalau masyarakat tidak paham. Kita harus ajak mereka sejak dini termasuk anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah, agar rantai kemiskinan kultural bisa putus.

Kedua: regulasi yang berjalan paralel dengan edukasi dan didukung infrastruktur dasar di pesisir seperti jalan, air bersih, listrik, internet.

Ketiga: restorasi lingkungan, terutama mangrove. Bukan sekadar tanam, tapi ajak masyarakat memahami nilainya baik ekologis maupun ekonomis. Karena di akar mangrove, ada pakan alami untuk udang dan ikan. Di sana juga hidup kepiting kenari yang kini harganya tembus Rp.400.000 per ekor karena kelangkaan.

Redaksi : Harapan terakhir Bapak terhadap peran institusi seperti perguruan tinggi dan pemerintah?

Harapan terbesar kami adalah bagaimana konsep *triplehelix* bisa dijalankan sesuai dengan peran kita masing-masing. Kampus dengan core bisnis tridharma yang akan melahirkan konsep, gagasan ide dan berbagai macam inovasi tak akan bermakna kalau tidak di *takeover* oleh swasta sedangkan pemerintah sebagai regulator membuat kebijakan bisa mewadahi dan mengakselerasi target yang ingin dicapai.

Ini konsep pada tataran ide, namun apa yang terjadi saat ini belum sepenuhya berjalan karena ego sektoral. Kampus jalan sendiri, swasta jalan sendiri, pemerintah juga jalan sendiri. Padahal yang dibutuhkan adalah sinergitas antara tiga komponen itu, menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita jalankan kalau negara mau maju. Dan terakhir, bagaimana pemerintah dapat menyiapkan anggaran untuk kegiatan riset, baik itu riset dasar maupun riset terapan, sehingga hasil dari riset-riset tersebut dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan. (Red.)





MEMBANGUN KALTARA DENGAN PRINSIP EKONOMI HIJAU DAN SIRKULAR

Ekonomi hijau bukan sekadar tren global, melainkan kebutuhan mendesak bagi daerah kaya alam seperti Kaltara. Ia menyeimbangkan tiga pilar yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ketergantungan pada sektor tambang dan perkebunan yang eksploitatif harus segera diimbangi dengan pendekatan berkelanjutan. Praktik seperti *ecobrick, agroforestri,* dan pengolahan limbah sudah mulai tumbuh di sejumlah desa. Wawancara ini menghadirkan pandangan Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.T.P.,M.M, Rektor Universitas Kaltara tentang peluang, tantangan, dan langkah nyata menuju ekonomi hijau di Kaltara.

Redaksi : Bagaimana Bapak mendefinisikan ekonomi hijau, dan mengapa pendekatan ini penting dalam konteks pembangunan daerah saat ini?

Kalau dari definisi, menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), ekonomi hijau adalah proses penataan ulang sistem ekonomi agar lebih ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon, memperbaiki efisiensi sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ekonomi hijau itu setidaknya mengacu pada tiga dimensi, ada dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Jadi, ekonomi hijau itu mengangkat ketiganya sekaligus.

Kalau bicara dimensi ekonomi, itu berarti efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak boros, tidak eksploitatif. Pada dimensi lingkungan, pembangunan harus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan pelestarian ekosistem. Yang terakhir, dimensi sosial pada ujungnya, pembangunan ekonomi itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, prinsip utama ekonomi hijau adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga ekosistem lingkungan. Kualitas lingkungan harus tetap hidup, tetap bagus dan inilah yang dijaga oleh pembangunan berkelanjutan.

Makanya, sekarang ini di RPJMN juga sudah ada arahan dari Bapak Menteri PPN/Bappenas tentang suatu model kalau tidak salah namanya *Indonesia Green Economy Model.* Intinya, model pembangunan ekonomi hijau ini harus diterapkan di semua daerah. Kenapa ekonomi hijau ini penting? Karena pembangunan di daerah kita baik di tingkat provinsi maupun kabupaten masih sangat berbasis pada sumber daya alam.

Kalau kita lihat data PDRB, sektor pertambangan masih paling tinggi, sekitar 25–30 persen. Lalu sektor pertanian sekitar 14–16 persen. Dua sektor ini, semuanya mengandalkan sumber daya alam. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketergantungan pada sektor pertambangan. Memang saat ini ekonomi kita masih ditopang olehnya tapi sampai kapan? Kita bisa berkaca

dari kejadian-kejadian terkini di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, yang sebagian besar disebabkan oleh eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang masif dan berlebihan.

Kita khawatir hal serupa terjadi di tempat kita. Semoga tidak. Masih ada waktu untuk memperbaiki arah pembangunan, agar generasi berikutnya masih bisa menikmati kekayaan alam dan lingkungan yang sehat. Maka, dalam konsep ekonomi hijau, yang ditekankan adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jadi, pertumbuhan boleh berjalan, tapi kualitas lingkungan tetap terjaga. Ini penting dan sangat relevan untuk daerah seperti Kaltara.

Redaksi : Sektor-sektor apa saja yang menurut Bapak paling potensial dikembangkan sebagai pilar ekonomi hijau di daerah?



Berdasarkan beberapa kajian, ada 11 sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan masuk dalam kategori ekonomi hijau. 11 sektor dinilai memenuhi tiga kriteria ekonomi hijau (*multiplier* ekonomi tinggi, emisi CO_2 relatif rendah, dan distribusi pendapatan baik) sehingga layak menjadi prioritas dalam *green economy.*

Salah satunya adalah ekowisata. Maksudnya, keindahan alam yang natural itu dijaga, tidak dirusak. Kalau konsep di hulunya bagus alam dijaga, hutan dilindungi, komunitas lokal dilibatkan, adat istiadat dihormati maka ekowisata bisa tumbuh dengan baik dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, termasuk bagi PDRB.

Selain itu, ada juga pertanian berkelanjutan, tanaman pangan, perkebunan, dan sebagainya. Tapi perkebunan ini juga harus kita pilah-pilah. Misalnya, kelapa sawit anggaplah selama 15–25 tahun terakhir, kontribusinya terhadap ekonomi memang bagus. Tapi apakah dampaknya terhadap ekologi juga positif? Itu yang masih perlu kita lihat. Kita lihat di Sumatera Utara, Aceh apa yang terjadi di sana? Banyak kawasan hutan yang rusak akibat perluasan perkebunan tanpa kendali. Ini jadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, bagaimana perkebunan bisa memberikan kontribusi ekonomi tanpa merusak lingkungan.

Begitu juga dengan pertambangan. Saat ini, perusahaan mengeruk sumber daya, dan meninggalkan lubang bekas galian. Itu menjadi PR perusahaan bagaimana lahan itu bisa direklamasi dan dipulihkan. Tapi pertanyaan besarnya, praktik mana yang benar-benar berhasil mengembalikan

hutan ke kondisi normal? Kita belum banyak melihat contohnya. Yang saya khawatirkan, dampaknya tidak dirasakan oleh kita, tapi oleh anak cucu kita.

Satu sektor lain yang sangat potensial adalah pengolahan limbah. Ini sebenarnya sangat menjanjikan, tapi belum kita optimalkan baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Padahal, kalau dikelola dengan baik, limbah bisa memberikan nilai ekonomi dan bahkan jadi sumber energi terbarukan. Misalnya, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, satu orang menghasilkan 0,7–1 kg sampah per hari. Bayangkan di Kaltara dengan 750 ribu penduduk berapa ton sampah yang dihasilkan setiap hari?

Semua itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Sampah organik bisa diolah jadi pupuk organik, baik cair maupun padat. Di tempat kami, kami pernah coba inovasi sampah organik dimanfaatkan kembali untuk tanaman. Ini perlu kita tingkatkan. Pemerintah juga harus memberikan ruang dan peluang besar bagi para inovator dalam pemanfaatan limbah. Jadi, memang banyak sektor yang relevan untuk dikembangkan dalam ekonomi hijau tinggal bagaimana kita memulainya.

Redaksi : Bagaimana pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, pelaku usaha, dan sektor swasta dalam mewujudkan ekonomi hijau?

Pemerintah harus punya kebijakan yang dirancang agar masyarakat bisa terlibat aktif. Misalnya, mulai dari pembentukan karakter sejak dini. Di tingkat kabupaten/kota, pendidikan dasar seperti TK, SD, SMP berada di bawah kewenangan daerah. Di sini, bisa dititipkan kurikulum lokal tentang pengelolaan sampah seperti mengajarkan anak-anak membedakan sampah organik dan non-organik, terbiasa tidak memakai plastik sekali pakai dan membuang sampah di tempatnya

Ini soal karakter. Karakter yang tidak terbentuk dalam semalam. Edukasi juga harus dilakukan di luar sekolah, di masyarakat luas. Dan tentu, harus didukung infrastruktur dari penanganan sampah di rumah tangga sampai ke tempat pengolahan akhir. Untuk dunia usaha, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang mendorong partisipasi mereka. Misalnya, UMKM yang menggunakan bahan ramah lingkungan bisa dapat insentif pajak, keringanan retribusi, atau kemudahan akses pinjaman.

Tapi di sisi lain, juga harus ada kewajiban misalnya, perusahaan wajib mengelola limbahnya, atau menggunakan kemasan ramah lingkungan. Ini harus jadi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, agar lama-lama jadi kebiasaan. Awalnya memang berat tapi kalau ada aturan yang jelas dan konsisten, lama-lama jadi karakter. Contoh kecil dulu, kita makan permen, buang bungkusnya sembarangan. Sekarang, kita kantongi dulu, baru



buang di tempat sampah. Itu karakter. Dan saya sangat mendorong agar hal ini diperkuat di dunia pendidikan. Lingkungan sekolah, kampus, kantor, pusat perbelanjaan semua harus jadi tempat pembentukan karakter hijau. Kalau karakter masyarakat sudah terbentuk, petugas kebersihan pun tidak perlu bekerja terlalu berat, karena kebersihan jadi tanggung jawab bersama.

Pemerintah juga bisa memberikan insentif langsung, seperti program tukar sampah plastik di bank sampah dengan emas atau hadiah lain. Ini sudah ada di beberapa daerah, dan termasuk praktik baik yang perlu diperluas.

Redaksi : Apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan ekonomi hijau di tingkat daerah?

Tantangan terbesarnya, menurut saya, adalah keterbatasan anggaran daerah. Dalam ekonomi hijau, ada indikator seperti PDRB hijau, investasi hijau, dan sebagainya semua itu butuh infrastruktur dan pendanaan. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. Maka, dibutuhkan inovasi dan kolaborasi dengan swasta, perguruan tinggi, komunitas, bahkan pemerintah pusat.

Ekonomi hijau tidak bisa dijalankan oleh pemerintah sendirian. Harus ada kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Kalau ini terbangun, implementasinya akan jauh lebih mudah. Contoh kita ingin kembangkan energi terbarukan itu butuh investasi besar. Di Kaltara, ada rencana pembangunan PLTA, tapi investasinya luar biasa. Maka, kita bisa mulai dari skala mikro misalnya, di daerah hulu yang punya aliran air tetap, bisa dibangun pembangkit mikrohidro.

Tantangan kedua adalah perubahan perilaku masyarakat. Tapi ini bisa diatasi kalau ada aturan, edukasi, dan keteladanan. Di banyak desa di Indonesia, ada aturan adat yang mewajibkan siapa pun termasuk tamu untuk menjaga kebersihan. Hasilnya? Lingkungan tetap asri. Tantangan-tantangan ini membuat implementasi ekonomi hijau tidak mudah, dibutuhkan komitmen, sumber daya, kolaborasi, serta kebijakan jangka panjang. Konsep seperti ini perlu kita adopsi untuk mendukung implementasi ekonomi hijau di daerah.

Redaksi : Apa contoh praktik baik ekonomi hijau yang sudah berhasil diterapkan terutama di Indonesia dan bisa jadi inspirasi bagi daerah di Kaltara?

Sebenarnya banyak, bahkan di Kaltara sendiri sudah ada. Misalnya, di Desa Gunung Sari, ada kelompok masyarakat yang mengolah botol plastik jadi ecobrick, lalu dibuat jadi sofa dan furnitur. Ini sudah bernilai ekonomi.

Dari sisi pemerintah, ada program TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi) di tingkat provinsi. Ini adalah anggaran khusus yang dialokasikan ke desa-desa, dengan syarat harus digunakan untuk pelestarian lingkungan seperti agroforestri, pengelolaan sampah, pemanfaatan limbah ternak jadi pupuk organik, dan sebagainya.

Program ini bahkan dikompetisikan di desa dengan inovasi terbaik bisa dapat dana hingga ratusan juta rupiah. Tapi sayangnya, ruang lingkupnya masih di desa. Padahal, sampah paling banyak dihasilkan di kota. Maka, perlu juga program serupa yang menyasar masyarakat perkotaan. Selain itu, banyak UMKM yang memanfaatkan limbah plastik kemasan jadi produk bernilai seperti tas, dompet, kotak tisu, dan sebagainya. Ini adalah praktik ekonomi sirkular yang masuk dalam konsep ekonomi hijau.



Redaksi : Mengapa transisi dari ekonomi linear (ambil-pakai-buang) ke ekonomi sirkular penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan?

Pertama, karena sumber daya alam kita terbatas. Kalau tidak dikelola dengan baik, suatu saat akan habis dan dampaknya buruk bagi lingkungan maupun masyarakat.



Kedua, hampir semua aktivitas kita menghasilkan limbah seperti minum air mineral kemasannya jadi sampah, cuci pakai sabun/deterjen menjadi limbah cair dan kemasan serta masak pakai bumbu instan kemasannya jadi sampah. Semua ini berasal dari industri. Maka, PR kita adalah bagaimana menciptakan produk yang ramah lingkungan, dan bagaimana limbahnya bisa dipakai ulang.

Contohnya, kemasan plastik bisa diolah jadi tas, kotak tisu, atau bahan bangunan yang bernilai ekonomi dan bermanfaat. Ini sangat penting untuk daerah kita. Mumpung jumlah penduduk masih sedikit, lahan masih luas, dan lingkungan masih bagus. Kita masih punya waktu untuk membangun sistem yang berkelanjutan.

Lihat saja kota besar seperti Jakarta atau Bandung sudah tidak nyaman lagi. Di trotoar saja, aromanya tidak sedap itu akibat pembangunan yang dulu hanya mengejar output ekonomi semata, tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem ke desa-desa, dengan syarat harus digunakan untuk pelestarian lingkungan seperti agroforestri, pengelolaan sampah dan pemanfaatan limbah ternak.

Redaksi : Apa contoh nyata penerapan ekonomi sirkular yang bisa direplikasi oleh pemerintah daerah di Kaltara?

Di Kaltara, praktik ekonomi sirkular sudah mulai tumbuh, tapi skalanya masih kecil. Di luar daerah, misalnya di Surabaya dan Jawa Timur, sudah ada fasilitas yang mengolah sampah jadi energi terbarukan. Ada juga teknologi yang mengubah limbah plastik jadi konblok.

Selain itu seperti Inisiatif pengelolaan limbah tekstil / UMKM *upcycling* (Balikpapan, Safina Quilt) Sebuah UMKM di Balikpapan mengumpulkan sisa tekstil/ limbah pakaian sebagai bahan baku untuk produk *quilting/upcycling.* Model ini memanfaatkan limbah lokal menjadi produk bernilai tambah, menciptakan pendapatan lokal dan mengurangi sampah tekstil.

Pendekatan serupa dapat direplikasi oleh pemerintah daerah dengan mendukung rantai pasokan bahan baku, pelatihan keterampilan, dan akses pasar. Tapi masalahnya investasinya mahal, dan pemerintah belum mendukung pemasarannya. Produk daur ulang belum diprioritaskan dalam pengadaan barang daerah. Maka, kalau mau mengadopsi praktik baik ini, kita harus siapkan infrastruktur, pendanaan, kelembagaan pengelola. Jadi, limbah rumah tangga bisa diolah oleh UMKM jadi produk rumah tangga, atau di skala lebih besar jadi sumber energi terbarukan. Ini yang perlu kita dorong.



Peningkatan Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik Berbasis Eco-Paving Ekonomi Hijau di Desa Gn. Sari



Dalam konsep ekonomi hijau, yang ditekankan adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jadi, pertumbuhan boleh berjalan, tapi kualitas lingkungan tetap terjaga. Ini penting dan sangat relevan untuk daerah seperti Kaltara.

Didi Adriansyah

Rektor Universitas Kalimantan Utara

Redaksi : Apa pesan Bapak kepada perencana pembangunan, pelaku usaha, dan masyarakat umum untuk mulai mengadopsi gaya hidup dan praktik ekonomi yang sesuai prinsip ekonomi hijau?

Sebenarnya, prinsip ekonomi hijau dan ekonomi sirkular sudah masuk baik secara implisit maupun eksplisit dalam RPJMD dan perencanaan pembangunan daerah. Tapi tantangannya di implementasi.

Yang perlu diperkuat anggaran yang memadai, kelembagaan yang jelas siapa yang mengelola dan mengawasi, pembentukan karakter di sekolah, kantor, dan masyarakat, dan infrastruktur pendukung di Kaltara, pintu masih terbuka lebar. Kita punya keunggulan jumlah penduduk masih sedikit, emisi karbon rendah, kualitas lingkungan masih baik dan hutan masih luas.

Yang perlu dijaga kebijakan perizinan pemanfaatan kawasan hutan jangan sembarangan. Jika kita fokus pada tiga dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan maka nanti PDRB kita akan jadi “PDRB hijau”, yang mencerminkan investasi hijau, *green job,* dan inklusivitas.

Insya Allah, kalau ini konsisten dijalankan, perekonomian di Kaltara akan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, karena potensi kita memang ada di sana. (Red.)

Bappeda Se-Indonesia Perkuat Sinergi Perencanaan Daerah



Banjarmasin - Rapat Koordinasi Bappeda Se-Indonesia sukses diselenggarakan pada 2 s.d 4 Desember 2025 lalu. Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel Rattan-In Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bertius, S.Hut. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Bappeda provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia dan dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah serta merumuskan langkah strategis dalam mendukung pencapaian sasaran program strategis nasional 2026.

Rangkaian acara dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, sekaligus memberikan arahan strategis mengenai pentingnya harmonisasi perencanaan pembangunan. Dalam sambutan pembukanya, Wakil Menteri Dalam Negeri menghimbau kepada Kepala Bappeda untuk memastikan setiap proses

perencanaan, penganggaran dan pengendalian tetap berorientasi pada data, regulasi dan kebutuhan masyarakat bukan pada kepentingan jangka pendek.

Dalam pencapaian target nasional, keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah memiliki peran penting terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Program strategis nasional merupakan program yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan. Beberapa program strategis nasional yang menjadi fokus Presiden meliputi program makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, peningkatan ketahanan pangan dan energi, serta penanganan kemiskinan dan kesehatan.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas, Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ menyampaikan paparan tentang langkah-langkah sinergi pusat daerah dalam pengawalan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, strategi penguatan pondasi keuangan daerah meliputi penataan struktur pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah serta perluasan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan daerah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini menyampaikan paparan tentang memaknai statistik untuk pembangunan daerah yang berdampak. Percepatan pertumbuhan ekonomi dari daerah dapat dilakukan melalui langkah konkret yaitu Percepatan realisasi APBD, Percepatan realisasi PMA dan PMDN yang padat karya, Percepat realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, Pengendalian harga bahan pokok, Pencegahan ekspor dan impor Ilegal, Perluasan kesempatan kerja, Tingkatkan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal, Tingkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal dan mempermudah perizinan berusaha.





Rakornas ini juga memiliki agenda penting yaitu pengukuhan Dewan Pengurus Forum Bappeda Indonesia Tahun 2025-2027 yang telah terbentuk pada Rakornas sebelumnya. Tema yang diusung adalah Sinergitas Perencanaan Daerah melalui Program Strategis Nasional dalam mendukung Astacita. Tujuan Forum Bappeda Indonesia adalah memperkuat sinergi perencanaan pembangunan nasional dan lintas daerah, menjadi wadah komunikasi strategis antar Bappeda provinsi dan kab/kota, mengembangkan kolaborasi integrasi terbaik dan menjadi forum konsultasi dan pertukaran praktik di masing masing daerah.

Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius S.Hut., dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Tata Kelola Kelembagaan, Kerja Sama Antara Daerah. Adapun tugas yang diemban yaitu menyusun desain kelembagaan kerjasama daerah, mekanisme koordinasi lintas daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan perencana. (ENR)

Platform SDGs KU : Wadah Kolaborasi Pemerintah dan Non-Pemerintah



Tarakan - *Sustainable Development Goals* sepertinya sudah tidak asing ditelinga kita, khususnya para aktor pemerintah, lalu bagaimana dengan aktor non pemerintah ? itulah bagian yang tidak kalah penting, bagaimana nantinya SDGs ini mampu menjangkau aktor seluruh pihak terkhususnya di Kalimantan Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan tidak lagi menjadi ranah eksklusif pemerintah.

Salah satu aktor non pemerintah yaitu perusahaan melalui Divisi *Community Development (Comdev)* dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan aktor strategis yang dapat mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs).* Namun, tantangan di daerah umumnya sama: kontribusi dunia usaha seringkali bersifat parsial, tidak terdata, dan tidak terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.

Kalimantan Utara seperti yang kita ketahui saat ini bukan lagi sebagai provinsi termuda di Indonesia namun selalu berusaha menjadi garda terdepan yang sampai saat ini banyak menghadapi tantangan unik. Pertumbuhan industri, ekspansi perkebunan, dan dinamika investasi berjalan cepat, tetapi hal ini tidak selalu seiring dengan penyelarasan program CSR terhadap target SDGs daerah.

Di sinilah timbulnya inovasi yang dapat mengakomodir peran *state actor* juga *non state actor* melalui aplikasi SDGs KU (*Sustainable Development Goals* Kalimantan Utara). Kegiatan Dukungan Penginputan Rencana Aksi Program CSR Perusahaan Tahun 2025–2029 dalam aplikasi SDGs KU untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs di Kalimantan Utara sebagai salah satu intervensi kebijakan yang juga merupakan sebuah langkah awal untuk menjembatani dunia usaha agar seiring dengan arah pembangunan daerah.

Selama ini yang kita ketahui bahwa program CSR hanya dipandang sebatas kegiatan filantropi seperti bantuan paket sembako, pembangunan sarana ibadah, atau kegiatan sporadis lainnya. Padahal dalam konteks SDGs program CSR memiliki potensi jauh lebih strategis diantaranya sebagai sumber daya tambahan bagi pencapaian indikator SDGs daerah, pendorong inovasi sosial, alat memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat, bagian dari sistem tata kelola pembangunan, bukan sekadar program sosial perusahaan.

Namun hal ini hanya dapat terwujud jika program CSR menjadi bagian dari sistem perencanaan dan pelaporan yang jelas, akuntabel, dan terukur.



Tanpa itu, kontribusi perusahaan hanya akan menjadi catatan internal bagi perusahaan, bukan modal pembangunan daerah. Maka dari itu, tujuannya jelas bahwa SDGs KU sebagai penguat reputasi perusahaan sebagai mitra pembangunan berkelanjutan di daerah.

Peluncuran aplikasi SDGs-KU oleh Sekretariat SDGs melalui Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk modernisasi tata kelola SDGs di daerah. Aplikasi SDGs KU juga telah mengalami beberapa fase pengembangan yang cukup siginifikan, bukan hanya sebagai alat pelaporan namun juga sebagai basis data terpadu CSR dan kontribusi *Non State Actor* lainnya, sebagai instrument monitoring dan evaluasi SDGs yang otomatis terhubung dengan indikator sesuai dengan kewenangan provinsi dan Kab/Kota, sebagai platform kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah, juga sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi perusahaan dalam pelaksanaan program CSR maupun dari pemerintah daerah.

Kegiatan penginputan program CSR 2025–2029 dalam aplikasi SDGs KU guna memastikan bahwa setiap perusahaan memahami bagaimana program yang mereka laksanakan dapat dikategorikan, dinilai, dan berkontribursi dalam pelaksanaan SDGs. Hal yang seringkali terjadi banyak perusahaan yang sebenarnya memiliki program CSR yang telah berjalan dan terlaksana dengan baik namun tidak begitu familiar dengan indikator – indikator SDGs, cara mensinkronisasikan program perusahaan dengan target pembangunan daerah, dan juga format pelaporan SDGs.

Kegiatan ini memberikan tiga hal penting yakni 1) Peningkatan kapasitas teknis peserta yang dalam hal ini adalah perencana untuk dapat menginput data program CSR ke sistem SDGs-KU, 2) Pemaparan substansi SDGs sehingga perusahaan memahami konteks kebijakan secara lebih strategis., 3) Penyelarasan program CSR 2025-2029 dengan target dan indikator SDGs Kalimantan Utara sehingga program perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi selaras dengan prioritas Kalimantan Utara. Ketiga hal ini menjadi penting agar program CSR tidak hanya terlaporkan, tetapi

juga relevan dan berdampak.

Integrasi program CSR ke dalam SDGs-KU memberikan implikasi kebijakan yang signifikan diantaranya menjadi bagian dari sistem perencanaan daerah dimana dengan tersedianya data program CSR pemerintah dapat mensinergikan program perusahaan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, memperkuat *Multistakeholder Partnership* yang merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pencapaian SDGs sesuai degan perpres 111/2022. MSP merupakan praktik nyata yang sudah dilaksanakan Provinsi Kalimantan Utara selama dua tahun terakhir antara pemerintah dan non pemerintah.

Meningkatkan transparansi dan akuntabliitas serta citra kinerja perusahaan ke publik yang dapat meminimalkan kegiatan program CSR yang tidak berdampak, dan juga data yang terintegrasi dapat mengurangi risiko tumpang tindih program. Harapannya hal ini bukan hanya menjadi suatu kewajiban tetapi juga sebagai modal sebagai investasi sosial jangka panjang bagi perusahaan.

Kegiatan penginputan program CSR 2025–2029 melalui SDGs-KU sesungguhnya adalah langkah strategis dalam membangun tata kelola pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara. Ketika data program CSR perusahaan terintegrasi dengan baik, pemerintah dapat merencanakan pembangunan daerah dengan lebih cermat, perusahaan dapat berkolaborasi dengan lebih tepat sasaran, dan masyarakat dapat merasakan manfaat program yang lebih nyata.

DALAM KONTEKS SDGS, **PROGRAM CSR MEMILIKI POTENSI JAUH LEBIH STRATEGIS DIANTARANYA SEBAGAI SUMBER DAYA TAMBAHAN BAGI PENCAPAIAN INDIKATOR SDGS DAERAH, PENDORONG INOVASI SOSIAL, ALAT MEMPERKUAT HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT, BAGIAN DARI SISTEM TATA KELOLA PEMBANGUNAN,** BUKAN SEKADAR PROGRAM SOSIAL PERUSAHAAN.

Kalimantan Utara sedang membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan maka dari itu kolaborasi dengan non pemerintah yaitu dunia usaha adalah salah satu kuncinya. Sehingga kegiatan ini merupakan pondasi dan satu langkah awal yang tidak kalah penting dalam upaya tersebut. Pembangunan berkelanjutan bukan sekedar tentang tujuan global, tetapi tentang bagaimana kita berkolaborasi di tingkat lokal. (CTY)



Dari Sosialisasi ke Penyempurnaan Perencanaan: Transformasi Pangan dan Gizi Kaltara 2025-2029





Solo - Sistem pangan Indonesia kini sedang mengalami perubahan arah yang penting. Pangan tidak lagi sekadar dipahami sebagai urusan produksi atau ketersediaan, tetapi sebagai ekosistem yang mencakup distribusi, konsumsi, status gizi masyarakat, kondisi lingkungan, hingga ketahanan ekonomi rumah tangga. Tantangan perubahan iklim, ketergantungan pada komoditas tertentu, dinamika harga, serta kesenjangan akses antar wilayah menunjukkan bahwa Indonesia perlu membangun sistem pangan yang jauh lebih terintegrasi.

Untuk itu, pemerintah pusat memperkenalkan dua dokumen strategis yakni Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2025–2029, dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAN-P3BPSDL) 2024-2030. Melalui kedua dokumen tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa perbaikan gizi berjalan seiring dengan pengembangan pangan lokal, diversifikasi konsumsi, dan pemanfaatan sumber daya daerah

sebagai kekuatan utama ketahanan pangan.

Agenda ini kemudian diperkuat melalui Sosialisasi Nasional RAN-PG dan RAN-P3BPSDL yang diselenggarakan di Kota Solo pada 29–30 September 2025. Sosialisasi tersebut menegaskan bahwa daerah tidak hanya perlu memahami arah kebijakan nasional, tetapi juga menyesuaikan dokumen perencanaan yang telah dimiliki. Upaya tersebut dilanjutkan dengan pendampingan teknis penyusunan dokumen daerah di Surabaya pada 23–24 Oktober 2025, yang memberikan panduan rinci tentang penyelarasan program, analisis situasi, dan penyusunan indikator.

Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi yang memperoleh manfaat signifikan dari sosialisasi ini, termasuk pemahaman mengenai perlunya pembaruan dokumen daerah sesuai pendekatan nasional yang lebih integratif.

Kalimantan Utara sebelumnya telah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Namun dengan hadirnya kebijakan nasional yang mengintegrasikan aspek pangan, gizi, dan penganekaragaman pangan lokal, dokumen tersebut perlu diperbarui. Integrasi dua kebijakan nasional itu kemudian harus diterjemahkan ke dalam dokumen daerah yang lebih lengkap dan menyatu, yaitu Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) 2025–2029. Dokumen baru inilah yang akan menjadi pedoman kerja lintas sektor di Kaltara selama lima tahun ke depan.

Pembaruan ini menjadi langkah penting bagi Kaltara, bukan hanya sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pusat, tetapi juga sebagai respon terhadap kebutuhan daerah sendiri. Wilayah Kaltara yang memiliki tantangan geografis beragam meliputi pesisir, perbatasan, pedalaman, dan kepulauan membutuhkan kerangka aksi yang mampu menghubungkan intervensi gizi, pengembangan pangan lokal, dan penguatan sistem distribusi dalam satu alur kebijakan yang jelas. Penyempurnaan dokumen juga memungkinkan pemerintah provinsi memetakan kembali program lintas sektor sehingga tidak lagi berjalan secara terpisah, tetapi saling melengkapi.

Lebih dari itu, dokumen ini secara langsung selaras dengan RPJMD Kalimantan Utara 2025–2029, yang menempatkan ketahanan pangan, penurunan stunting, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Dengan kata lain, penyusunan RAD-PGBPSDL menjadi instrumen operasional yang memastikan arah kebijakan dalam RPJMD dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret yang terukur.

Manfaat, Dampak, Tantangan dan Peluang bagi Kaltara

Integrasi dokumen nasional ke dalam rencana aksi daerah memberikan manfaat nyata bagi pemerintah provinsi. Salah satu manfaat yang paling terasa adalah perbaikan tata kelola data. Dengan menyusun dokumen yang lebih



komprehensif, pemerintah daerah terdorong memperbaiki kualitas data pangan dan gizi, yang selama ini masih terfragmentasi. Data yang lebih kuat akan membuat perencanaan lebih berbasis bukti dan program lebih tepat sasaran.

Selain itu, penyempurnaan dokumen daerah membuka ruang koordinasi lintas sektor yang lebih efektif. Perangkat daerah yang selama ini menjalankan program sendiri-sendiri kini dapat bekerja dalam satu kesatuan strategi. Keterpaduan ini mempermudah komunikasi antar-instansi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi tumpang-tindih program.

Dari sisi masyarakat, manfaatnya bahkan lebih luas. Penguatan pangan lokal dapat membuka peluang ekonomi baru bagi petani, nelayan dan UMKM. Komoditas lokal seperti singkong, ubi jalar, ikan bandeng, udang windu, rumput laut, serta hasil hutan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ketika ekonomi lokal tumbuh, pendapatan keluarga meningkat dan akses pangan bergizi menjadi lebih mudah.

Secara kesehatan, dokumen perencanaan yang terintegrasi mempermudah pelaksanaan intervensi gizi yang tepat sasaran. Ibu hamil, balita, remaja, serta keluarga rentan dapat memperoleh layanan gizi yang lebih fokus dan konsisten. Pada saat yang sama, edukasi konsumsi pangan beragam dan seimbang dapat dijalankan lebih masif karena didukung oleh penguatan produksi pangan lokal.

Meski demikian, penyempurnaan dokumen daerah tentu tidak lepas dari tantangan. Menyatukan





program lintas sektor membutuhkan komitmen yang konsisten, terutama dalam hal pembagian peran, pemahaman indikator, dan komunikasi antar instansi. Tantangan lainnya adalah kesenjangan kapasitas teknis, baik dalam hal analisis data maupun pemetaan potensi lokal yang memerlukan sumber daya manusia terlatih. Kondisi geografis Kaltara yang luas dan bervariasi juga menyulitkan pendataan lapangan dan pemetaan kerentanan pangan secara detail.

Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar. Momentum sosialisasi nasional dan pendampingan teknis memberi arahan yang jelas dan dukungan langsung dari pemerintah pusat. Ini memperkuat kapasitas daerah dalam merumuskan dokumen perencanaan berkualitas. Selain itu, keberagaman komoditas pangan di Kaltara adalah aset besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan strategi yang tepat, pangan lokal dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas pangan daerah.

Akhirnya, penyempurnaan dokumen perencanaan pangan dan gizi Kaltara menjadi langkah strategis yang tidak hanya mengikuti mandat nasional, tetapi juga kebutuhan nyata daerah. Dengan arah kebijakan yang semakin terintegrasi, provinsi ini memiliki kesempatan besar untuk membangun sistem pangan masa depan yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (AA)

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kaltara melalui Kolaborasi Perencanaan: Refleksi Rakor Bappeda dan Litbang se-Kaltara Tahun 2025

Tana Tidung - Rapat Koordinasi Bappeda dan Litbang se-Kalimantan Utara yang diselenggarakan pada 25–27 November 2025 di Kabupaten Tana Tidung menjadi momentum penting dalam memperteguh arah pembangunan daerah. Dengan mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara: Kolaborasi Bappeda dan Litbang se-Kaltara dalam Meneguhkan Sektor Unggulan untuk Daya Saing Daerah", kegiatan ini menghadirkan ruang dialog, integrasi gagasan, dan perumusan strategi percepatan pembangunan berbasis riset serta potensi unggulan wilayah.

Rakor ini dibuka melalui pertemuan ramah tamah di Pendopo Japaruddin pada 25 November 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung, H. Hersonsyah. Suasana tersebut tidak sekadar menjadi forum penyambutan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya sinergi lintas daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.



Pada hari berikutnya, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setda Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., mewakili Gubernur Kalimantan Utara memberikan arahan strategis terkait peningkatan kualitas perencanaan sebagai prasyarat mewujudkan visi daerah yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut diperkaya dengan paparan akademis oleh Dr. Margiono, S.E., M.Si. mengenai pertumbuhan ekonomi dan keunggulan daerah, serta oleh Dr. M. Asfihan Nur Arifin, S.T., M.T. yang menekankan peran perencana dalam merumuskan langkah akseleratif di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah.

Melalui diskusi tersebut, Rakor menempatkan riset kebijakan, data spasial, dan penguatan analisis ekonomi regional sebagai pilar yang harus diperkuat oleh seluruh Bappeda dan Litbang se-Kaltara dalam proses perencanaan di tahun-tahun mendatang.

Tiga Desk Pembahasan: Merumuskan Strategi Lintas Sektor

Rangkaian diskusi teknis pada sesi siang dipecah ke dalam tiga desk yang mencerminkan isu strategis pembangunan Kalimantan Utara yaitu :
Desk 1 Infrastruktur dan Konektivitas. Membahas kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur, keterhubungan wilayah, dan peningkatan aksesibilitas layanan dasar.

Desk 2 Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Sirkular. Mengkaji peluang diversifikasi ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengembangan ekonomi maritim, serta pemanfaatan limbah menjadi nilai tambah.

Desk 3 Sumber Daya Manusia, Inovasi, dan Pemuda. Fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan pusat inovasi daerah, dan pemberdayaan pemuda sebagai agen transformasi.

Melalui pendekatan deliberatif, ketiga desk menghasilkan sintesis pemikiran yang kemudian disampaikan oleh perwakilan masing-masing. Proses ini tidak hanya menghadirkan kesepahaman lintas daerah, tetapi juga menghasilkan dokumen kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Rakor Bappeda dan Litbang se-Kaltara Tahun 2025.

> **“Pembangunan Kalimantan Utara Hanya Dapat Melesat Jika Setiap Daerah Bergerak Bersama, Berbagi Data, Berbagi Gagasan, Dan Menyatukan Visi Untuk Masa Depan Yang Lebih Berdaya Saing**

Berita Acara tersebut memuat dua blok kesepakatan strategis yang menjadi rujukan pembangunan daerah ke depan. Pertama, paradigma perencanaan kawasan diperkuat melalui integrasi perencanaan Provinsi–Kabupaten/Kota, peneguhan sektor unggulan, percepatan implementasi ekonomi hijau, biru dan sirkular, dan peningkatan kapasitas SDM, inovasi, serta pembiayaan alternatif pembangunan. Kesepakatan ini menegaskan bahwa daya saing regional hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang berkelanjutan dan koordinasi yang terstruktur.

Rakor menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berbasis potensi dan kekuatan lokal. Setiap kabupaten/kota didorong untuk

> **"Perencanaan yang baik dimulai dari data yang kuat, riset yang relevan, dan komitmen bersama untuk membangun Kaltara secara berkelanjutan."**

memperbarui profil potensi unggulan sebagai dasar pengembangan rantai nilai daerah. Penguatan UMKM berbasis komoditas unggulan, efisiensi sumber daya melalui ekonomi sirkular, serta peningkatan kualitas SDM lokal menjadi fokus untuk menggerakkan transformasi ekonomi. Selain itu, riset dan inovasi kebijakan ditetapkan sebagai instrumen wajib, memperkuat fungsi Litbang sebagai pendorong kebijakan berbasis bukti *(evidence-based policy making)*. Kesepakatan ini mencerminkan orientasi baru pembangunan Kaltara mendorong kemandirian ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada APBD konvensional, dan memperluas ruang investasi melalui sektor-sektor prioritas.

Pada hari ketiga, peserta Rakor melaksanakan kegiatan lapangan di Hutan Pinus Tana Tidung dengan tema *"One Team, One Spirit, One Mission"*. Kegiatan ini diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan *team project* yang mempertemukan peserta lintas Bappeda dan Litbang. Aktivitas lapangan ini tidak hanya membangun kebersamaan, tetapi juga menguatkan budaya kerja kolaboratif yang menjadi fondasi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

Rangkaian Rakor tahun ini juga memperlihatkan bagaimana setiap daerah di Kalimantan Utara memiliki keunikan, tantangan, dan peluang yang berbeda, namun tetap bergerak menuju satu tujuan bersama. Melalui dialog terbuka, peserta saling bertukar pandangan mengenai isu-isu strategis seperti penguatan industri berbasis komoditas unggulan, kebutuhan konektivitas antarwilayah, hingga pentingnya inovasi dalam menghadapi penurunan ruang fiskal.

Suasana diskusi yang aktif menunjukkan bahwa perencanaan bukan hanya tentang angka dan dokumen, tetapi tentang menyatukan perspektif, mendengarkan kebutuhan daerah lain, dan membangun kepercayaan untuk maju bersama.

Tidak hanya itu, Rakor Bappeda dan Litbang se-Kaltara tahun ini memberikan ruang bagi munculnya ide-ide kreatif yang segar, terutama dari generasi perencana muda. Banyak gagasan baru yang muncul terkait pemanfaatan teknologi, sistem informasi perencanaan, dan pengembangan ekonomi hijau yang lebih progresif. Keterlibatan aktif peserta dalam setiap sesi mencerminkan semangat bahwa Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk melesat lebih cepat asal dikelola dengan kerja sama yang solid dan komitmen pada perencanaan berbasis bukti.

Dengan atmosfer kolaboratif yang menguat, Rakor ini menjadi simbol bahwa pembangunan Kaltara bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan kolektif untuk masa depan yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Rakor Bappeda dan Litbang se-Kaltara tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam pemantapan arah pembangunan Kalimantan Utara. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal, riset kebijakan, dan kolaborasi lintas wilayah, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang relevan untuk menjawab tantangan fiskal, ekonomi, dan daya saing daerah.

Melalui semangat bersama, Bappeda dan Litbang se-Kaltara menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen kolektif untuk bekerja dalam satu visi: pembangunan Kalimantan Utara yang lebih unggul dan berkelanjutan.

Pesan Utama Rakor ini adalah pembangunan Kalimantan Utara hanya dapat melesat jika setiap daerah bergerak bersama, berbagi data, berbagi gagasan, dan menyatukan visi untuk masa depan yang lebih berdaya saing. (RT)
















IUTAN PINU



Coaching Clinic 7 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota

Tanjung Selor - Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) telah ditetapkan sebagai sarana pencapaian layanan sanitasi berkelanjutan dengan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi yaitu Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi berkelanjutan, Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, Peningkatan perubahan perilaku Masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi dan Pengembangan kerja sama pola pendanaan.

Pelaksanaan PPSP di daerah dilaksanakan dengan mengimplementasikan dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), baik SSK yang masih berlaku/valid maupun SSK yang secara bersamaan tengah disusun/dimutakhirkan. Keberhasilan implementasi SSK sangat ditentukan oleh proses advokasi pada dua tahun pertama yaitu

ketika SSK disusun atau fasilitasi implementasi tahun pertama dan pada tahun berikutnya. Tahapan implementasi SSK dibagi ke dalam empat proses (*milestone*/M), yaitu Komitmen kepala daerah (M1), Penetapan kebijakan (untuk uji coba model) (M2), Uji Coba Model layanan sanitasi skala terbatas (M3) dan Uji coba model layanan skala penuh (perluasan/*scaling up*) (M4)

Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki 2 (dua) Kabupaten dengan status M1 – M3 (Kab. Malinau – M1 dan Kab. Tana Tidung – M3) dan 3 (tiga) Kab/Kota dengan status M4 (Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kab Bulungan). Pemerintah Pusat melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara menugaskan 1 (satu) orang) Fasilitator Implementasi untuk mendampingi implementasi SSK Kab. Bulungan dan mendampingi pelaksanaan 2 (dua) *coaching clinic* (CC) untuk Kab./Kota M4 yakni CC 6 dan CC7.

Coaching clinic merupakan kerangka peningkatan kapasitas dan pelatihan *(capacity building and training)* yang dikembangkan PPSP untuk memastikan tersedianya kapasitas pada tiap-tiap sasaran implementasi SSK. Kerangka kerja ini mengintegrasikan empat saluran dalam sebuah metoda belajar blended learning: pelatihan di kelas, *e-learning/e-discussion, buddy system* dan pendampingan teknis secara langsung *(hands on technical assistance).*

Pokja PKP Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan *Coaching Clinic* 7, pada hari Kamis, 13 November 2025, dengan metode *Hybird* di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara. Dihadiri oleh Pokja PPAS Nasional, Pokja PKP Prov. Kaltara, Pokja PKP Kab. Nunukan, Bulungan, Kota Tarakan, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara dan Fasilitator Implementasi.

CC7 ini memberikan bantuan teknis secara tatap muka yang dilakukan di tingkat provinsi terkait implementasi skala layanan penuh, didasarkan pada rencana tindak lanjut yang disusun pada *Coaching Clinic* 6, yakni pemantauan dan evaluasi implementasi skala penuh tahun berjalan N+1 dan rencana kegiatan/replikasi implementasi layanan skala penuh tahun berikutnya N+2.

Pokja PKP Kab. Nunukan, Bulungan, Kota Tarakan menyampaikan Pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Evaluasi hasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, Pembelajaran pelaksanaan ujicoba model layanan, Readiness criteria kegiatan tahun 2026 – 2029, dan Rencana Kerja Pokja Kab/Kota tahun berikutnya, untuk kemudian ditanggapi oleh Pokja PPAS Nasional, Pokja PKP Prov. Kaltara, BPBPK Kaltara dan Fasilitator Implementasi.

Dari CC7 ini dihasilkan pembelajaran dari hasil pemantauan dan evaluasi implementasi skala penuh bagi Pokja Kab/Kota, Pokja Kab/Kota dapat melakukan internalisasi kepada OPD terkait dan eksternalisasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk usulan program kegiatan tahun N+2 dan draft usulan rencana aksi multiaspek untuk ujicoba pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan tahun N+2. (RSL)





Benuanta Fest 2025 Jadi Panggung Penghargaan bagi Inovator Terbaik Kalimantan Utara

Tanjung Selor – Dalam rangkaian pembukaan Benuanta Fest 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara resmi mengumumkan pemenang Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, sebagai bentuk apresiasi kepada para inovator hebat yang terus berkontribusi dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Bumi Benuanta.

Kompetisi tahunan ini bertujuan menjaring ide-ide brilian dari berbagai kalangan masyarakat, pelajar/mahasiswa, perusahaan, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan pembangunan di Kalimantan Utara.

Beberapa inovasi unggulan yang tampil antara lain Muhammad Tigo Gunawan meraih Juara I berkat Teknologi Pembibitan Mangrove dengan Kolam Pasang Surut Buatan, sementara di kategori Pelajar/Mahasiswa, Juara I diraih oleh inovasi Low GI Rice (Beras Rendah Glikemik) yang mendukung ketahanan pangan dan kesehatan.

Kategori Perusahaan dimenangkan oleh Agus Yahya melalui inovasi pemanfaatan limbah FABA menjadi beton ramah lingkungan, sedangkan di kategori ASN Kab/Kota, Imam Noviwidiyanto dari Tanah Tidung berhasil menjadi Juara I melalui VITTA *(Virtual Intelligence Tanah Tidung Tourism Assistant)* sebuah asisten pariwisata berbasis kecerdasan buatan yang memperkuat branding daerah.

Dalam kategori *Innovative Government Award,* diraih SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif) oleh Dedy Salman, S.Pd. dari SMAN 1 Nunukan Selatan dan Bertius, S.Hut, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagai Perangkat Daerah Sangat Inovatif.

Sementara itu, di kategori ASN Provinsi, Damar Firdauzi ,S.Pi meraih Juara I lewat SADAR LAUT (Sistem Asisten Data dan Referensi Perikanan Laut). Lomba Inovasi Daerah Kaltara 2025 didukung oleh para sponsor strategis yaitu Bankaltimtara, Global Green Growth Institute (GGGI), GIZ, CV Khasanah Konsultama, dan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara.

Selamat kepada seluruh pemenang! Inilah para inovator hebat Kaltara. (AS)

PEMENANG LOMBA

INOVASI DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2025



DEDY SALMAN, S.PD

Inovasi SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif)



BERTUS, S.HUT

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan



DAMAR FARADZI, S.PI

JUARA 1

Sadar Laut (Sistem Pelaten Data dan Referensi Perikanan Laut)



RUDI SALAM

JUARA 2

Smart - Sense Sekat Integrasi untuk Efisiensi Energi



ANI HARTONO

JUARA 3

Pelayanan Pajak SUMMAT Delivery (Papa Sanji



INAH NOVIWIJANTO

JUARA 1



DR. PUTRI DIAN VITASARI, MM

JUARA 2

Kolaborasi Santai (Kader Duta Sadar Gizi Selamat Pariasi)



WARI WICAKSONO

JUARA 3



AGUS YAHYA

JUARA 1



DEA PARWATI

JUARA 2



DEA ROMANA

JUARA 3



INOVASI LOW CI RICE

JUARA 1

Beras Rendah Glikemik



INOVASI JABRIM

JUARA 2

Jadam Liquid Fertilizer Solusi Kesuburan Tanah Masam untuk Ketahan Pangan



INOVASI OZMO

JUARA 3



MUHAMMAD TOGA GUMPAMIN

JUARA 1



SUMARTI

JUARA 2

Inovasi Kartu Disabilitas



ROBINGYAH

JUARA 3

Inovasi Alat Pembersih Tali Bentang

Link and Match Revitalisasi Pendidikan Vokasi melalui Rencana Aksi Daerah



Tarakan - Provinsi Kalimantan Utara untuk kedua kalinya melakukan agenda melalui *Focus Group Discussion* Penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Tahun 2025-2029. Yang bikin agak berbeda dari rapat diskusi biasanya adalah dengan hadirnya kepala SMK juga perusahaan sebagai wujud nyata dalam menampung aspirasi, saran serta masukan terhadap pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kalimantan Utara.

Vokasi merupakan arahan prioritas pemerintah daerah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Kalimantan Utara pada agustus 2025 berasal dari lulusan SMK sebesar 6,01%. Di tengah dinamika ekonomi Kalimantan Utara yang bergerak cepat ditandai dengan pertumbuhan industri energi, pertambangan, manufaktur, perikanan, layanan logistik, hingga proyek strategis nasional, kebutuhan akan tenaga kerja terampil menjadi semakin mendesak. Provinsi Kalimantan utara sejatinya memiliki peluang besar, tetapi peluang hanya dapat dimanfaatkan apabila kualitas sumber daya manusia selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal maupun nasional.

Kesenjangan kompetensi *(skill gap)* masih menjadi persoalan utama. Banyak lulusan pendidikan vokasi belum mampu memenuhi standar kompetensi industri. Di sisi lain, lembaga vokasi menghadapi keterbatasan jumlah dan kapasitas instruktur, kesenjangan fasilitas dan peralatan pelatihan dengan standar industri, akses terbatas di wilayah terpencil, perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga kurikulum sulit menyesuaikan, serta kemitraan industri yang belum optimal.

Dalam konteks inilah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Rancangan Awal RAD Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 2025–2029. Kegiatan ini juga merupakan langkah awal dalam upaya membangun ekosistem vokasi yang berkelanjutan dan kompetitif bagi Kalimantan

Utara.

Vokasi bukan sekadar jalur alternatif pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Dengan adanya penguatan vokasi berarti Kalimantan Utara dapat menyiapkan tenaga kerja siap pakai untuk sektor energi dan industri, memenuhi kebutuhan kompetensi proyek strategis seperti KIHI Tana Kuning–Mangkupadi, memperkuat sektor maritim, perikanan, dan logistik yang menjadi keunggulan geografis, dan dapat meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama bidang kesehatan dan pariwisata. Namun revitalisasi vokasi hanya akan efektif bila pendidikan, pelatihan, industri, dan pemerintah saling bersinergi dan berkolaborasi.

Penyusunan RAD Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Tahun 2025–2029 Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dalam bentuk FGD yang dirancang sebagai ruang dialog multisektor yang melibatkan diantaranya perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota teknis terkait, SMK, Politeknik, BLK, akademi, dan perguruan tinggi, perusahaan dan asosiasi industri, lembaga sertifikasi profesi, serta mitra pembangunan.

Isu strategis mengenai vokasi yang saat ini dihadapi Kalimantan Utara diantaranya pertama, tidak selarasanya antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan, hal ini menyebabkan adanya keluhan kurangnya keterampilan teknis dasar, *soft skills* dan kesiapan kerja. Kedua, sebagian program keahlian mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja, dampaknya sulit menyesuaikan dengan kurikulum yang ada.

Ketiga, keterbatasan guru produktif dan instruktur tersertifikasi, padahal keberhasilan vokasi sangat ditentukan oleh kualitas pengajar. Keempat, sarana praktik yang belum memadai dan menyebabkan beberapa sekolah dan Balai Latihan Kerja (BLK) belum memiliki peralatan sesuai standar industri. Kelima, *Link and Match* masih sangat terbatas, hanya sebatas MoU tanpa adanya implementasi seperti pemagangan atau *teaching factory* hal ini yang menjadi harapan para kepala SMK agar perusahaan dengan benefit besar mendapatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga ketika ada pihak SMK yang datang untuk melakukan MoU dapat dipriroitaskan.

Dokumen RAD yang disusun melalui FGD ini memiliki fungsi strategis diantaranya menjadi peta jalan resmi pengembangan vokasi daerah dalam hal ini menjadi acuan bagi semua lembaga vokasi dan industri selama lima tahun ke depan. Dengan harapan RAD yang disusun memastikan bahwa hubungan lembaga vokasi dan industri tidak bersifat proyek, tetapi kolaborasi jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi menyiapkan beberapa pertanyaan FGD berdasarkan peran dan kontribusi multisektor, agar apa yang dibutuhkan untuk keberlanjutan revitalisasi pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi dapat terpetakan secara maksimal dan tepat sasaran.

Kalau saja kita mampu melihat secara lebih dalam bahwa Kalimantan Utara memiliki bonus lokasi strategis yang tidak semua daerah miliki, potensi industri yang saat ini lagi berkembang pesat, dan adanya dukungan kebijakan nasional. Namun tanpa SDM yang berkualitas, peluang ekonomi sulit dimaksimalkan. FGD dan penyusunan RAD ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai berpindah dari pendekatan parsial menjadi pendekatan multisektor. Sehingga secara jangka panjang revitalisasi vokasi dapat diproyeksikan meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, menekan angka pengangguran lulusan muda, memperkuat investasi, menciptakan tenaga kerja lokal yang tersertifikasi dan adaptif.

Penyusunan RAD Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi adalah upaya membangun masa depan Kalimantan Utara melalui peningkatan SDM. FGD Penyusunan RAD Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 2025–2029 adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan dan pelatihan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan ekonomi daerah dan membuka jalan bagi generasi muda Kaltara untuk berdaya saing nasional maupun global. Dengan komitmen dan kolaborasi multisektor, Kalimantan Utara berpeluang besar menjadi contoh provinsi yang berhasil mengelola vokasi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. (CTY)



Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menjadi pembina apel pagi yang diikuti segenap ASN di lingkungan Pemprov. Kaltara (Foto : DKISP)

Optimalisasi Anjab Dan ABK Di Bappeda & Litbang Untuk Mendukung Implementasi Sistem Merit

Tarakan – Bappeda dan Litbang turut menghadiri acara Rapat Kerja Teknis Penyusunan ANJAB dan ABK yang berlangsung di Hotel Padmaloka Tarakan pada 18 s.d 20 November tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh Tim Penyusun Anjab dan ABK Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Selama dua hari pelaksanaan, Anjab dan ABK Bappeda dan Litbang telah disesuaikan dengan *bezzeting* dan kebutuhan, ketika data Anjab dan kompetensi jabatan telah terintegrasi, data tersebut nantinya dapat digunakan secara optimal, antara lain untuk mengetahui tugas rinci dari tiap jabatan, perencana, analis, operator dan sebagainya, mencegah terjadinya tumpang tindih tugas antar bidang. Kemudian menjelaskan kompetensi apa yang harus dimiliki ASN Bappeda dan Litbang

serta menentukan hasil kerja dari setiap jabatan.

Penguatan Kompetensi dan Penyelarasan Bezetting dilaksanakan selama dua hari kegiatan, peserta tidak hanya mendapatkan materi konseptual mengenai pentingnya Anjab dan ABK, tetapi juga diarahkan pada praktik penyempurnaan dokumen berdasarkan struktur organisasi, peta jabatan, dan beban kerja aktual di masing-masing perangkat daerah.

Bagi Bappeda dan Litbang kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) berdasarkan *bezzeting riil* yang mencakup jumlah pegawai eksisting dan kebutuhan ideal memperbaiki deskripsi tugas jabatan yang selama ini masih memerlukan penyempurnaan mengidentifikasi kompetensi wajib bagi jabatan perencana analis kebijakan peneliti evaluator dan operator data.

Serta menyatukan pemahaman seluruh bidang terhadap alur kerja dan tanggung jawab masing-masing jabatan pendampingan yang dilakukan secara intensif, membantu memastikan bahwa dokumen Anjab dan ABK Bappeda dan Litbang menjadi lebih akurat terukur dan sesuai standar sehingga data yang dihasilkan dapat diintegrasikan secara penuh dengan sistem kepegawaian digital seperti perencanaan formasi pengembangan kompetensi dan kebutuhan mutasi internal.

Hal ini juga merupakan salah satu langkah kesiapan kita dalam penerapan Sistem Merit yaitu sistem pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja yang berarti rekrutmen pegawai dilakukan secara objektif, promosi jabatan didasarkan pada kemampuan dan prestasi, penilaian kinerja dilakukan secara transparan pengembangan kompetensi diberikan sesuai kebutuhan dan reward serta punishment diberikan secara adil.

Manfaat integrasi Anjab dan ABK bagi organisasi antara lain struktur jabatan menjadi lebih jelas karena setiap jabatan memiliki uraian tugas fungsi dan output yang terukur, perhitungan kebutuhan pegawai menjadi lebih tepat karena dihitung secara objektif sesuai beban kerja, peran antar unit menjadi lebih terstruktur dan tidak saling tumpang tindih sehingga pembagian kerja antar bidang lebih teratur dan efisien. Selain itu penempatan pegawai menjadi lebih akurat karena mutasi rotasi atau promosi dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan jabatan integrasi, ini juga menjadi dasar pengembangan kompetensi ASN karena kebutuhan pelatihan menjadi lebih terarah.

Setelah kompetensi jabatan terpetakan secara jelas mendukung penerapan Sistem Merit, untuk pengambilan keputusan kepegawaian menjadi lebih objektif transparan dan berbasis data perencanaan, formasi menjadi lebih akurat karena kebutuhan formasi baru dapat dihitung berdasarkan beban kerja aktual serta akuntabilitas. Transparansi organisasi terjaga karena data dan dokumen kepegawaian menjadi lebih lengkap, valid dan siap digunakan dalam evaluasi kinerja. (MM)





Pokja PUG Kaltara Digerakkan, Revitalisasi untuk Wujudkan Anggaran Responsif Gender

Tanjung Selor - Di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (5/11/), suara angklung dari Yayasan Karya Murni menyambut para peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka hadir bukan untuk seremoni biasa, melainkan untuk menghidupkan kembali mesin penggerak strategis pembangunan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat Koordinasi dan Lokakarya Teknis ini menjadi titik tolak revitalisasi peran Pokja PUG. Tujuannya jelas yaitu mengubah kesetaraan gender dari wacana menjadi aksi konkret dalam setiap tahap pembangunan daerah, terutama melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Sesi diskusi panel menjadi inti kegiatan hari pertama. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Bertius, S.Hut, sebagai narasumber utama, menekankan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang cerdas, bukan sekadar isu sosial. “Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah pembangunan yang kita rencanakan hari ini sudah memberikan ruang yang adil bagi semua

laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menikmati hasilnya?" tanyanya di awal paparan.

Paparan yang bertajuk "Kebijakan dan Arah Pembangunan Responsif Gender di Daerah" tersebut menjabarkan bagaimana PUG terintegrasi dalam Visi-Misi RPJMD Kaltara 2025-2029. Salah satu dari delapan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah "SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender", menunjukkan komitmen politik yang tinggi. Namun, komitmen di atas kertas harus diterjemahkan ke dalam arsitektur kinerja yang terukur, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Gender.

"PUG bukan konsep abstrak. Ia hidup dalam kebijakan dan program konkret," tegas Bertius. Langkah konkret yang disoroti adalah integrasi analisis gender ke dalam dokumen perencanaan melalui *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan penerjemahannya dalam *Gender Budget Statement (GBS).* Inilah yang menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) di setiap OPD.

Sesi diskusi yang difasilitasi Tenaga Ahli GEDSI SKALA mengupas tantangan nyata di lapangan, bagaimana memastikan ARG bukan hanya sekadar *tagging* atau penandaan di sistem perencanaan, tetapi benar-benar mencerminkan program yang adil. "ARG bukan 'anggaran tambahan' khusus perempuan. Ini adalah cara menggunakan anggaran yang ada agar manfaatnya dirasakan secara setara," jelas seorang fasilitator.



Contoh yang mengemuka adalah program pelatihan UMKM yang harus memastikan kuota partisipasi perempuan, atau layanan kesehatan yang memperhatikan kebutuhan spesifik ibu dan anak di daerah terpencil. Beberapa OPD mengakui masih mengalami kendala dalam menyusun GBS dan mengidentifikasi program yang benar-benar responsif gender. Di sinilah peran Pokja PUG dan *Focal Point* PUG di setiap OPD menjadi krusial sebagai motor perubahan internal.

Untuk memberi gambaran praktis, hadir perwakilan Pemerintah Provinsi DIY yang berbagi pengalaman optimalisasi peran Pokja PUG di daerah mereka. Kolaborasi lintas OPD, pendampingan teknis yang berkelanjutan, dan kepemimpinan yang kuat disebut sebagai kunci keberhasilan.

Hasil refleksi dan diskusi kemudian dikristalkan dalam sebuah Komitmen Bersama yang ditandatangani oleh pimpinan OPD dan anggota Pokja PUG yang hadir. Komitmen ini berisi ikrar untuk memperkuat kelembagaan Pokja PUG, mengintegrasikan ARG secara sungguh-sungguh dalam perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kapasitas SDM di bidang PUG.

Hari kedua lokakarya (6/11) akan difokuskan pada penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-PKG). Dokumen ini akan menjadi peta jalan resmi lima tahun ke depan untuk pembangunan yang adil gender di Kaltara.

Revitalisasi Pokja PUG di Tanjung Selor ini merupakan sinyal kuat bahwa Kaltara serius menjadikan kesetaraan sebagai fondasi transformasi daerah. Kini, tantangannya adalah memastikan komitmen di ruang rapat itu mengalir deras menjadi program nyata di lapangan, yang dirasakan oleh setiap perempuan, laki-laki, dan anak di seluruh penjuru Benuanta. (ROM)



Kaltara Perangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tarakan – Bertempat di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (2/12), puluhan perwakilan dari berbagai dinas provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Utara berkumpul dalam satu ruangan. Agenda yang dibahas bukan sekadar rapat koordinasi biasa, tetapi sebuah upaya konkret mengawal dua misi kemanusiaan yang mendesak yaitu percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat kabupaten/kota dan penguatan langkah pencegahan serta penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DPPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara Dadang Wahyudi, S.STP., Perencana Ahli Madya Asisten Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dianawati Lasmindar, S.Sos., serta Analis SDM Aparatur Ahli Madya Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Ranto Bernard, SP.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala DPPPAPPKB Provinsi Kaltara, Burhanuddin, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya disampaikan bahwa berdasarkan data nasional, sebagian besar korban TPPO berasal dari keluarga berpenghasilan rendah serta minim pemahaman terhadap modus kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan kecepatan penanganan serta sinergi lintas sektor agar upaya pencegahan dan perlindungan korban dapat berjalan secara efektif.

Selain isu TPPO, Burhanuddin juga menekankan urgensi percepatan pembentukan UPTD PPA di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Keberadaan UPTD PPA dinilai sangat strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk korban TPPO.

Pada sesi pemaparan materi, Dadang Wahyudi menjelaskan peran dan fungsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pentingnya pembaruan struktur Gugus Tugas di Provinsi Kalimantan Utara agar selaras dengan dinamika dan kompleksitas kasus TPPO yang semakin berkembang. Ia menegaskan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi program TPPO dalam perencanaan daerah, serta dukungan penganggaran yang memadai.

Kegiatan ditutup pada sore hari dengan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan TPPO serta peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak. (ROM)

Wujudkan Pelayanan Publik Unggul, Kaltara Perkuat Tata Kelola Inovasi Daerah



Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Noudy R.P. Tendean,



Tanjung Selor - Dalam rangka mempercepat transformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan SKALA menyelenggarakan Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar pada Senin, (10/11).

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut dalam sambutannya menegaskan bahwa inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. “Inovasi harus menjadi napas reformasi birokrasi cepat, transparan, dan selaras dengan dinamika kebutuhan warga,” ujarnya.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pemprov Kaltara menargetkan pencapaian Indeks Inovasi Daerah (IID) minimal 65,00 kategori “sangat inovatif”. Menurut Bertius, target ini bukan sekadar angka, melainkan komitmen moral untuk menanamkan budaya inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai narasumber utama, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Noudy R.P. Tendean, mengapresiasi langkah progresif Kaltara, namun mengingatkan pentingnya diversifikasi sektor inovasi. “Saat ini, inovasi di Kaltara masih didominasi urusan kesehatan dan pendidikan. Ini baik, tetapi perlu diperluas ke sektor lain seperti perizinan, pertanian, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi agar manfaatnya lebih merata,” tegasnya.

“Setiap daerah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mereplikasi praktik baik. Prinsip o*ne agency, one innovation* harus dijalankan konsisten agar seluruh OPD berkontribusi nyata,” imbuhnya.

Lebih jauh, Noudy menekankan bahwa keberhasilan inovasi diukur bukan dari kuantitas, melainkan dari dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. “Inovasi yang baik adalah yang bisa diadopsi, direplikasi, dan mendorong peningkatan kualitas hidup serta pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya.

Workshop ini diharapkan menjadi katalis lahirnya ide segar, kolaborasi antar instansi, dan penguatan ekosistem inovasi yang inklusif sehingga Kalimantan Utara tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi tampil sebagai pelopor inovasi berkualitas di kawasan timur Indonesia. (AS)

Mencari Format Ideal Transfer Dana: Antara Amanat SPM dan Kebutuhan Spesifik Daerah





Tarakan – Bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Rabu hingga Kamis (29-30/10), ruang diskusi dipenuhi oleh para perencana pembangunan dari tingkat pusat oleh Kementerian PPN/Bappenas hingga daerah perwakilan provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota. Mereka berkumpul dalam Forum Diskusi Pemanfaatan DAU *Specific Grant* dan Evaluasi Dampak DAK yang digelar Kementerian PPN/Bappenas. Agenda utamanya jelas namun kompleks yakni menguji efektivitas dua instrumen utama transfer ke daerah dalam mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator makro pembangunan, terutama di Provinsi Kalimantan Utara.

Forum ini bukan sekadar ritual evaluasi tahunan. Ia hadir di tengah keprihatinan bahwa Dana Alokasi Umum *Specific Grant (*DAU SG) yang diamanatkan untuk mempercepat SPM, justru dinilai kaku dan kurang menyentuh kebutuhan spesifik daerah. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK), meski terbukti mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan prioritas nasional masih perlu dipetakan lebih rinci.

Presentasi pembuka dari Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang dibawakan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Mufied Azwar, S.PT menyoroti jantung persoalan. Slide presentasi bertajuk "Isu Pemanfaatan Dana Alokasi Umum *Specific Grant"* menunjukkan angka-angka yang kontras. Pada 2024, alokasi DAU SG untuk pendidikan di Kaltara sebesar Rp 116,5 miliar, jauh lebih kecil dibanding kebutuhan anggaran untuk memenuhi SPM bidang pendidikan yang mencapai Rp 262,9 miliar. Selisih

yang signifikan ini harus ditutup dari sumber APBD lainnya.

Namun, masalahnya bukan hanya pada besaran. "Menu kegiatan DAU SG sifatnya seragam untuk seluruh Indonesia," jelas salah seorang peserta diskusi dari dinas teknis daerah. Kebutuhan daerah yang beragam mulai dari tantangan geografis kepulauan, aksesibilitas, hingga karakteristik penduduk seringkali tidak tertampung dalam 'daftar menu' standar dari pusat. Akibatnya, daerah terpaksa memilih kegiatan yang 'tersedia' meski prioritas lokalnya mungkin berbeda, berpotensi mengurangi efektivitas dana dalam mendongkrak capaian SPM.

Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Fauzan dalam tanggapannya mengonfirmasi bahwa realisasi DAU SG 2023-2025 telah berjalan sesuai peraturan, namun efektivitasnya secara langsung meningkatkan skor SPM perlu kajian lebih mendalam. "Prinsipnya tidak boleh tumpang tindih dengan sumber dana lain. Tapi, bagaimana jika justru ada celah kebutuhan yang tidak tercover oleh menu standar tersebut?" tanyanya retoris.

Rekomendasi yang mengemuka kuat adalah perlunya DAU SG yang bersifat asimetris. Artinya, daftar kegiatan harus bisa lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kategori atau kondisi khusus daerah. Daerah kepulauan seperti Kaltara dengan banyak Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) butuh pendekatan berbeda dalam hal layanan kesehatan bergerak atau sarana pendidikan dibanding daerah metropolitan.

Sesi kedua pada Kamis (30/10) fokus pada evaluasi dampak DAK. Paparan dari Bappeda dan Litbang Kaltara mengungkap dinamika alokasi DAK fisik yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, sementara DAK non-fisik meningkat. Penurunan alokasi pasca Inpres 1/2025 menjadi poin kritis.

Pertanyaan besar yang menggantung adalah seberapa besar kontribusi DAK terhadap peningkatan IPM, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kunci? Kepala Dinas Pendidikan Kaltara menguraikan, meski DAK membantu pembangunan sarana, faktor seperti kualitas guru, manajemen sekolah, dan partisipasi masyarakat juga menentukan capaian indikator pendidikan. Hal serupa disampaikan perwakilan Dinas Kesehatan, DAK untuk pembangunan puskesmas dan peralatan penting, tetapi keberlanjutan operasional, ketersediaan tenaga kesehatan, dan pola penyakit masyarakat menjadi penentu akhir status kesehatan.

Kunjungan lapangan ke sejumlah output DAK di Kota Tarakan yakni di Rumah Sakit Dr. Jusuf, SK dan SMKN 2 Kota Tarakan, menjadi penutup yang konkret. Tim melihat langsung bagaimana infrastruktur yang dibangun dari DAK beroperasi. "Ini yang perlu dievaluasi, bukan hanya output fisiknya, tetapi *outcome*-nya bagi peningkatan layanan dan kesejahteraan," ujar seorang perencana ahli Bappenas.

Diskusi dua hari ini mengerucut pada beberapa rekomendasi kunci. Pertama, mendesain DAU SG asimetris dengan kategori daerah yang lebih detail (DTPK, daerah urban, daerah agraris, dll.) dan menu kegiatan yang lebih adaptif. Kedua, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi outcome DAK, tidak hanya output fisik, dengan tautan yang jelas terhadap indikator IPM dan prioritas nasional di RPJMN. Ketiga, yang paling sering disuarakan kepala daerah yaitu koordinasi dan integrasi perencanaan yang lebih baik. Program dari DAU SG, DAK, APBD, dan belanja K/L harus saling terpadu dan mengisi celah, bukan tumpang tindih, dalam peta jalan pencapaian SPM.

Forum ini menegaskan bahwa transfer ke daerah bukan sekadar urusan mengalirkan angka anggaran. Ia adalah instrumen strategis untuk pemerataan pembangunan. Tantangannya kini adalah menerjemahkan masukan dari daerah dari Tarakan hingga Malinau menjadi kebijakan yang lebih lincah, sensitif terhadap kebutuhan lokal, namun tetap terarah pada tujuan nasional. Seperti pesan yang terpampang dalam salah satu slide presentasi: "Tidak ada penganggaran yang tidak direncanakan, dan tidak ada perencanaan yang tidak dianggarkan." Kini, perencanaan itu menuntut lebih banyak fleksibilitas dan keberpihakan pada keberagaman daerah. (ROM)

Kaltara Susun Strategi Lima Tahun untuk Kesetaraan Gender yang Inklusif





Tarakan – Di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, suasana tidak biasa terasa sejak Senin (24/11). Deretan laptop terbuka, tumpukan dokumen Renstra, dan wajah-wajah serius dari puluhan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Utara memadati ruangan. Mereka hadir bukan untuk rapat koordinasi biasa, melainkan untuk sebuah 'maraton' penyusunan dokumen strategis yaitu Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-PKG) 2025-2029.

Kegiatan selama dua hari ini, yang dihelat oleh Tim Penyusun RAD Kesetaraan Gender melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Provinsi Kaltara sebagai Sekretariat dan Bappeda dan Litbang selaku Ketua Pelaksana, melibatkan tak kurang dari 51 unsur, mulai dari seluruh OPD, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, PEKKA, dan Muslimat NU. Agenda utamanya tegas yakni menghasilkan dokumen RAD-PKG yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis hasil evaluasi, sekaligus mendorong tata kelola pembangunan yang responsif gender dan berpihak pada kelompok rentan.

Pemaparan awal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI menyadarkan semua peserta tentang pekerjaan rumah yang belum tuntas. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah tidak cukup hanya dengan peraturan. Ia harus hidup dalam tujuh proses pembangunan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.

Data awal yang disampaikan DPPPAPPKB Kaltara mengungkap titik awal yang perlu didorong. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kaltara masih berkisar di angka 3.21% (2024), jauh dari target ideal minimal 5% dari pagu Renstra OPD. Sementara itu, upaya pengumpulan data terpilah (data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, dll) sebagai basis perencanaan yang inklusif masih menjadi tantangan besar.

Kertas kerja yang telah disiapkan masing-masing OPD, seperti yang terlihat dalam dokumen persiapan, menunjukkan upaya konkret namun masih timpang. Di satu sisi, Dinas Sosial merinci program rehabilitasi sosial bagi disabilitas, anak terlantar, dan lansia dengan indikator jumlah penerima manfaat yang jelas. Di sisi lain, banyak

OPD lain yang rencana aksi spesifik untuk kesetaraan gender masih perlu diperdalam dan diintegrasikan dengan tugas pokoknya.

Hari pertama dan kedua diisi dengan sesi paralel di dua ruang berbeda, memecah peserta berdasarkan klaster OPD. Di Ruang I yang dikordinatori Hendra Kurniawan dan dimoderatori Bappeda Litbang, diskusi berfokus pada OPD pendukung *(enabler)* seperti Biro Hukum, Biro Perekonomian, dan Badan Penghubung. Sementara di Ruang II yang dipandu Lilis Suryani dari SKALA dan DPPPAPPKB Kota Tarakan, pembahasan melibatkan OPD teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan organisasi masyarakat.

“Tantangan terbesar adalah mengubah mindset bahwa PUG bukan hanya urusan DPPPAPPKB. Setiap OPD, apakah itu Dinas ESDM yang membina kelompok tani hutan atau Dinas Perindustrian yang menangani UMKM, harus punya analisis gender dan rencana aksi spesifik,” ujar seorang peserta dari Bappeda Litbang dalam diskusi.

Dari dokumen kertas kerja yang beredar, beberapa rencana aksi mulai terbentuk. Bappeda Litbang, misalnya, mengusulkan kegiatan konsultasi publik dan musrenbang inklusif yang secara khusus menjaring aspirasi perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan. Mereka juga berkomitmen untuk menyusun dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) yang memuat substansi kesetaraan gender.

Sementara Dinas Kehutanan mengajukan program pemberdayaan kelompok tani hutan dengan pelatihan yang inklusif menyasar pada kelompok tani dari perempuan kepala keluarga. Organisasi masyarakat sipil hadir bukan sekadar ‘pemanis’. Perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia menyoroti pentingnya aksesibilitas fisik dan komunikasi dalam setiap program pemerintah.

“Pembangunan inklusif itu dimulai dari memastikan kami bisa hadir di ruang diskusi, memahami materi, dan aspirasi kami terdengar,” ujarnya. Sementara PEKKA Kabupaten Bulungan menyampaikan kebutuhan spesifik perempuan kepala keluarga di sektor ekonomi.

Mengaitkan Benang Merah dari RAD-PKG ke Anggaran dan Implementasi

Sebagai program kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Australia, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) hadir sebagai fasilitator sekaligus pengingat. “Dokumen RAD-PKG ini bukan untuk memenuhi rak arsip. Ini adalah peta jalan yang harus diterjemahkan ke dalam Renstra OPD, kemudian ke Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan akhirnya ke realisasi kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat,” papar Lilis Suryani, Senior Manager GEDSI SKALA.

Poin kritis yang terus mengemuka adalah soal Anggaran Responsif Gender (ARG). Peserta dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengingatkan, setiap program/kegiatan dalam RAD-PKG harus memiliki penjabaran anggaran yang jelas dan realistis. Komitmen meningkatkan ARG menjadi minimal 5% menjadi tantangan teknis sekaligus politis, membutuhkan kesadaran dan kemauan kuat dari para pimpinan OPD.

Pada akhir maraton dua hari, draf RAD-PKG 2025-2029 mulai menemukan bentuknya. Dokumen tersebut diharapkan tidak hanya berisi rencana aksi parsial setiap OPD, tetapi juga strategi besar dengan indikator makro yang terukur, seperti peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, penurunan angka kekerasan berbasis gender, dan peningkatan akses layanan dasar bagi kelompok disabilitas.

Kini, setelah laptop ditutup dan ruang hotel ditinggalkan, tantangan sesungguhnya dimulai bagaimana mentransformasi ratusan baris rencana aksi dalam kertas kerja excel menjadi gerakan nyata di lapangan. Dari ruang rapat di Tarakan, diharapkan terbit sebuah peta jalan yang tidak hanya memajukan perempuan, tetapi membawa seluruh masyarakat Kaltara laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan melangkah bersama menuju pembangunan yang lebih adil dan setara. Keberhasilan forum ini baru akan terlihat ketika angka-angka dalam indikator kinerja itu benar-benar hidup dalam kehidupan warga Kaltara sehari-hari. (ROM)



Rapat Koordinasi Penanganan Titik Rawan Laka Lantas Jl. Poros Bulungan – Berau KM. 16

Tanjung Selor - Meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi pada bulan November 2025 di Jl. Poros Bulungan – Berau Km. 16, mendorong Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara melalui Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (PPW) melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Forum LLAJ Kalimantan Utara.

Rapat Koordinasi penanganan titik rawan laka lantas Jl. Poros Bulungan – Berau Km. 16, dilaksanakan pada Jumat, 21 November 2025, dihadiri oleh Dirlantas Polda Kaltara, Dirlantas Polresta Bulungan, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltara, Dinas PU Perkim Prov. Kaltara dan Dinas Perhubungan Prov. Kaltara.

Berdasarkan data dari Satlantas Polresta Bulungan, selama bulan November terdapat 4 kejadian laka, seluruhnya dari arah Berau, waktu kejadian sekitar pukul 20.00 – 05.00 wita, dimana kondisi gelap dan didominasi faktor *human error.* Kondisi jalan diamati dari arah Berau menurun landai, adanya tikungan tajam, sebelum oprit jembatan terdapat penyempitan, kondisi jalan tidak berlubang/tidak rusak.
Dari arah Berau bila malam hari tidak terlihat jembatan. Rambu peringatan adanya turunan, adanya jembatan dan rambu peringatan rawan kecelakaan sudah terpasang. Di Km. 6 sudah terdapat Pos PJR Polda Kaltara, namun masih terkendala jaringan telekomunikasi.

Dari hasil koordinasi terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan untuk meminimalisir kejadian laka lantas Jl. Poros Bulungan – Berau Km. 16. Kendala ketersediaan jaringan telekomunikasi akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan dengan provider telekomunikasi. Polresta Bulungan dan Polda Kaltara telah memasang banner peringatan kawasan laka lantas dan akan menyiapkan rest area di dekat kawasan tersebut, untuk menurunkan angka laka lantas akibat *human error.*

BPTD Kelas II Kaltara akan melakukan penambahan rambu peringatan, pita penggaduh, *warning light* dan *guardrail* pada tahun anggaran 2026. Sambil menunggu berjalannya Tahun Anggaran 2026, mengingat pelaksanaan nataru pada bulan Desember 2025 akan dilaksanakan pemberian himbauan melalui pemasangan banner dari Polda Kaltara/Polresta Bulungan dan BPJN. Selain itu BPJN juga akan membangun posko-posko dalam rangka Nataru. Opsi penempatan 5 – 10 *water barrier* dari BPTD Kelas II Kaltara dapat dilaksanakan. *Water barrier* akan diisi menggunakan pasir atau cor beton untuk menghindari pencurian. (RSL)



SMART-SENSE
SOLUSI INTEGRASI UNTUK EFISIENSI ENERGI

[Inovator : Rudy Salam, ST]

SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur, sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar merupakan sekolah baru yang sering kali dihadapkan pada tantangan signifikan dalam manajemen operasional, khususnya terkait konsumsi energi dan kualitas lingkungan fisik.

Pemborosan energi listrik menjadi salah satu isu krusial yang tidak hanya membebani anggaran sekolah, tetapi juga mencerminkan praktik yang tidak berkelanjutan. Sistem manajemen yang masih konvensional dan manual menyebabkan lampu sering dibiarkan menyala di ruangan kosong, hingga tagihan listrik membengkak.

Inovasi SMART-SENSE yang telah diterapkan di SMKN 1 Tanjung Palas Timur merupakan lompatan signifikan dari metode pengelolaan fasilitas sekolah yang konvensional. SMART-SENSE mengintegrasikan berbagai sensor seperti sensor gerak, sensor suhu, kelembaban, sensor arus dan sensor tegangan menjadi satu jaringan terpadu di setiap ruang kelas dan fasilitas di SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur.

Data dari sensor-sensor ini dianalisis secara *real-time* untuk mengambil keputusan otomatis yang paling efisien. Sebagai contoh, untuk mematikan lampu dan kipas angin pada jam tertentu, sistem akan mematikannya dari jarak jauh saja dengan memanfaatkan *smartphone* selama periode waktu yang ditentukan, memastikan tidak ada energi yang terbuang percuma.



Pendekatan ini memberikan tingkat granularitas dan efisiensi yang tidak dapat dicapai oleh sistem manajemen energi tradisional.

Manfaat paling nyata dari sistem ini adalah penghematan biaya operasional yang substansial dan terukur. Di era di mana anggaran pendidikan seringkali terbatas, setiap rupiah yang dapat dihemat sangatlah berarti. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, rata-rata terjadi pengurangan konsumsi energi hingga 15-30% dari pembayaran Listrik pada tiap bulannya di SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur setelah implementasi yang setara dengan penghematanRp 6.000.000 per tahun dari biaya penggunaan energi listrik sekolah.

Secara keseluruhan, SMART-SENSE adalah solusi yang memberikan manfaat multidimensi. Mulai dari penghematan anggaran yang terukur, menghindari kegiatan pemborosan energi, peningkatan kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan performa akademis.



SADAR LAUT (SISTEM ASISTEN DATA DAN REFERENSI PERIKANAN LAUT)

[Inovator : Damar Firdauzi, S.Pi]

Salah satu masalah utama yang menjadi latar belakang inovasi ini adalah tersebarnya data kelautan dan perikanan di berbagai lokasi dan format. Data-data penting seperti jumlah produksi perikanan, hasil pengawasan, serta distribusi bantuan sarana dan prasarana sering kali tersimpan dalam arsip fisik, file digital yang tidak terintegrasi, atau tersebar di berbagai unit kerja yang berbeda.

Kondisi ini menciptakan informasi yang menyulitkan akses cepat dan komprehensif. Upaya untuk menyatukan dan menganalisis data ini secara manual adalah proses yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Akibatnya, pembuat kebijakan dan masyarakat umum mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran yang utuh dan akurat mengenai kondisi sektor perikanan di wilayah tersebut.

Dengan memanfaatkan teknologi *AI Agent* dan *Retrieval-Augmented Generation (RAG),* SADAR LAUT dapat membaca dan memahami database dokumen yang diunggah, termasuk data produksi, pengawasan, bantuan sarana atau data apapun itu yang berkaitan tentang kelautan dan perikanan. Pengguna cukup mengajukan pertanyaan, dan agen AI ini akan mencari jawaban yang relevan dari seluruh data yang tersedia dalam hitungan detik.

Dengan menggunakan platform yang fleksibel seperti Copilot dan N8n, SADAR LAUT dapat dengan mudah diperbarui dan disesuaikan seiring dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi. Masyarakat, termasuk nelayan, pelaku usaha, dan akademisi, kini dapat dengan mudah menemukan data dan referensi terkait perikanan dan kelautan, seperti regulasi, jenis bantuan yang tersedia, atau statistik produksi. Akses ini memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan yang lebih baik terkait mata pencaharian atau penelitian mereka.







ZIKA (ZINK SULFAT, INTERMITENT, KAPUR) : DARI TANAH MASAM MENUJU SWASEMBADA PANGAN

[Inovator : Ikrar Wicaksono, S.P]



ZIKA
Zink Sulfat, Intermiten Air, dan Kapur – Solusi Lahan Masam



Optimalisasi lahan rawa merupakan salah satu upaya untuk mendukung percepatan swasembada pangan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, dengan salah satu strategi utama berupa penggunaan varietas unggul baru. Program ini dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Desa Tanah Merah Barat, Kabupaten Tana Tidung.

Penggunaan varietas unggul baru mampu meningkatkan produktivitas pertanian karena memungkinkan penanaman sebanyak dua hingga tiga kali dalam satu tahun. Dengan demikian, indeks pertanaman tahunan meningkat dan secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas. Selain itu, penerapan Teknik ZIKA menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala lahan dengan pH rendah (asam), sehingga mendukung peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan varietas unggul baru.

Teknik ZIKA mendorong kebutuhan optimalisasi lahan untuk mengubah lahan masam menjadi lahan produktif. Sebuah solusi yang selaras dengan tujuan swasembada pangan dan perlindungan lahan pertanian. Dari kajian lapangan dan literatur, teknik ZIKA merupakan kombinasi ameliorasi pH (kapur), suplementasi hara mikro (zink sulfat), dan manajemen pengairan yang terkontrol (intermiten) menunjukkan potensi sinergis untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan hasil.

Teknik ZIKA ini tidak hanya dapat diimplementasikan pada lahan sawah saja, akan tetapi berbagai penanaman lainnya antara lain adalah padi, palawija, sayuran, buah-buahan (rambutan, nanas, pisang, jeruk, nangka, dan semangka) dan tanaman perkebunan kelapa, kelapa sawit dan lada.

Dengan perbaikan lahan masam melalui ZIKA, produktivitas pertanian meningkat, kualitas hasil panen membaik, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya lebih terjaga. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam memperluas areal tanam produktif tanpa harus membuka lahan baru, sehingga ketahanan pangan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.



MOBILITAS BERKELANJUTAN: MENYONGSONG KONEKTIVITAS HIJAU MENUJU 2045

[Penulis : Retno Sawitri Listyabratarini[1]]

Mobilitas berkelanjutan bukan hanya soal kendaraan listrik ini soal tata ruang, transportasi umum yang andal, logistik efisien, dan kebijakan yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan target rendah karbon. RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 memberi landasan strategis untuk mentransformasikan sistem mobilitas Indonesia menuju inklusif, efisien, dan rendah emisi.

Sektor transportasi merupakan tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga penyumbang emisi dan konsumsi energi yang besar. Transformasi ke mobilitas berkelanjutan *(sustainable mobility)* menjadi krusial untuk mendukung tujuan jangka panjang Indonesia yaitu pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju 2045. RPJPN 2025–2045 menetapkan visi jangka panjang tersebut sebagai kerangka arah nasional. Sementara RPJMN 2025–2029 menjadi periode awal operasionalisasi strategi yang menempatkan pembangunan hijau dan efisiensi energi sebagai prioritas.

Mengapa Mobilitas Berkelanjutan Penting Sekarang?

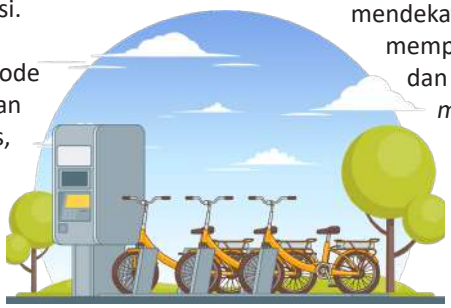
Mobilitas berkelanjutan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menurunkan polusi udara, memperbaiki akses layanan untuk kelompok rentan, dan menekan biaya logistik yang selama ini membebani daya saing ekonomi. Studi-studi terbaru menunjukkan



bahwa peningkatan layanan publik, elektrifikasi kendaraan, dan perubahan pola perjalanan dapat signifikan menurunkan konsumsi energi dan biaya bagi negara serta rumah tangga. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi yang dipatok RPJMN, efisiensi sektor transportasi menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan yang produktif dan rendah biaya.

RPJPN 2025–2045 memformulasikan visi pembangunan jangka panjang Indonesia yang berorientasi pada kemandirian, ketangguhan, dan keberlanjutan, kerangka yang secara natural mendukung strategi mobilitas berkelanjutan. Arahan RPJPN menekankan transformasi struktur ekonomi, peningkatan kualitas modal manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Semua itu menuntut sistem transportasi yang mendukung konektivitas inklusif tanpa mengorbankan lingkungan. Upaya jangka

panjang seperti pembangunan modal manusia dan penguatan infrastruktur berpotensi selaras dengan investasi pada transportasi publik, jaringan rel, dan koridor logistik rendah emisi.



RPJMN 2025–2029 adalah periode pembuka yang menentukan arah program prioritas, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Dalam konteks itu, RPJMN menetapkan program dan kebijakan operasional termasuk prioritas pembangunan hijau dan transportasi berkelanjutan yang harus diimplementasikan melalui kementerian/lembaga dan daerah. Ini adalah momen untuk mengintegrasikan kebijakan, insentif elektrifikasi kendaraan, investasi infrastruktur transportasi publik, modernisasi angkutan logistik, dan perencanaan kota berorientasi transit (TOD).

Langkah prioritas yang selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 dimulai dengan :

1. **Perkuat transportasi publik sebagai tulang punggung kota dan koridor antar-kota**. Investasi pada angkutan massal (bus rapid transit, rel ringan/ commuter, kereta antar-kota) dan integrasi tarif/ layanan untuk menggantikan perjalanan dengan kendaraan pribadi. (Sejalan dengan prioritas layanan publik dan efisiensi energi di RPJMN)

2. Akselerasi elektrifikasi kendaraan secara terintegrasi. Dorong ekosistem EV: produksi baterai dan komponen dalam negeri, stasiun pengisian yang tersebar, regulasi insentif, dan program substitusi kendaraan angkutan umum ke listrik. Laporan outlook nasional menyoroti potensi besar penghematan energi dari langkah ini.

3. Optimalisasi logistik dan *freight consolidation*
Penyusunan koridor logistik multimoda, digitalisasi rantai pasok, dan serapan teknologi efisiensi bahan bakar untuk menekan biaya logistik nasional, mendukung target pertumbuhan RPJMN.

4. Perencanaan wilayah berorientasi transit (TOD) dan mobilitas aktif
Menata tata ruang perkotaan untuk mendekatkan aktivitas ke akses publik, memperluas jaringan pejalan kaki dan sepeda sebagai moda *last-mile* yang sehat dan murah. Ini mengurangi kebutuhan perjalanan bermotor dan mendukung inklusivitas.

5. Pembiayaan inovatif dan penguatan tata kelola
Kombinasikan APBN/APBD, pembiayaan swasta (PPP), dan instrumen hasil hijau/utang hijau untuk menutup kebutuhan investasi infrastruktur berkelanjutan, perkuat koordinasi pusat-daerah agar program transportasi terintegrasi.

Indikator keberhasilan yang dapat dipantau selama 2025–2029 meliputi pangsa perjalanan menggunakan transportasi umum (%), pengurangan emisi CO_2 sektor transportasi (ton CO_2e), jumlah armada angkutan umum yang ter-elektrifikasi, biaya logistik sebagai persentase PDB, dan akses 15–30 menit ke moda publik untuk penduduk perkotaan.

Mobilitas Berkelanjutan dalam Konteks Kaltara

Sebagai salah satu provinsi muda di Indonesia, Kalimantan Utara menghadapi tantangan geografis yang unik. Wilayah yang sangat luas, permukiman tersebar, konektivitas antar wilayah yang terbatas, dominasi transportasi jalan darat dan sungai, serta biaya logistik yang masih tinggi. Pada saat yang sama, Kaltara sedang memasuki fase strategis pembangunan terutama dengan kehadiran proyek Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi, PLTA skala besar, serta pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru.

Dalam konteks ini, mobilitas berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi berjalan inklusif, efisien, dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.



Keselarasan kebijakan mobilitas berkelanjutan di Kalimantan Utara dengan arah pembangunan nasional tercermin dalam integrasinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada tiga pilar utama yaitu transisi energi dan ekonomi hijau, pembangunan infrastruktur yang merata, serta penguatan kawasan perbatasan.

1. Transisi Energi & Ekonomi Hijau
RPJPN menekankan transformasi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Kaltara memiliki positioning kuat, pasokan energi hijau dari PLTA Kayan dan rencana pengembangan energi terbarukan lainnya. Mobilitas berkelanjutan menjadi pelengkap logis transportasi umum listrik, logistik rendah emisi, kendaraan operasional kawasan industri berbasis EV, dan kapal sungai yang lebih efisien energi.

2. Pembangunan Infrastruktur yang Merata
RPJMN menempatkan percepatan konektivitas sebagai prioritas dan di Kaltara fokus ini diwujudkan melalui peningkatan jalan strategis provinsi dan nasional, pengembangan pelabuhan (Nunukan, Tengkayu, Mangkupadi), penguatan transportasi perbatasan (Krayan, Lumbis Ogong), serta aksesibilitas Desa–Kecamatan–Pusat Pertumbuhan sehingga mobilitas berkelanjutan di Kaltara berarti memadukan pembangunan fisik dengan pengelolaan transportasi cerdas dan efisien energi.

3. Penguatan Kawasan Perbatasan
RPJPN menekankan transformasi kawasan perbatasan dari “halaman belakang” menjadi “beranda depan” dan di Kaltara konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan sangat penting untuk membuka akses layanan dasar di Krayan, mendukung arus barang Nunukan–Tarakan–Malaysia, serta menurunkan biaya logistik melalui jaringan multimoda darat–laut–udara yang optimal.

Agenda Mobilitas Berkelanjutan untuk Kaltara

Berikut langkah-langkah strategis yang relevan dan bisa dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah:

Reformasi Transportasi Kota di Tarakan dan Tanjung Selor

Dua kota utama Kaltara sedang menghadapi urbanisasi cepat dan peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Strategi yang dapat diterapkan:

- Modernisasi angkutan umum perkotaan berbasis bus rendah emisi atau bus listrik.
- Integrasi layanan angkot, bus kota, dan transportasi daring.
- Kampanye bermobilitas dengan kendaraan non mesin seperti bersepeda.
- Pengembangan jalur sepeda dan pedestrian sangat relevan untuk pusat kota Tarakan yang padat dan Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi.

Logistik Rendah Emisi untuk Kawasan Industri

KIPI Tanah Kuning–Mangkupadi akan menjadi mesin ekonomi Kaltara. Untuk mengurangi beban lingkungan, perlu dirancang:

- Sistem logistik hijau *(green logistics)* dengan standar emisi.
- Kendaraan operasional berbasis listrik atau biofuel.
- Fasilitas transportasi air internal yang efisien,
- Manajemen arus barang digital untuk mengurangi waktu tunggu dan konsumsi energi.

Mobilitas Perdesaan & Daerah 3T Berbasis Solusi Lokal

Kaltara memiliki wilayah pedalaman seperti Krayan yang hanya bisa dijangkau udara. Mobilitas berkelanjutan dapat diwujudkan melalui:

- Subsidi logistik udara yang efisien *(airbridge)* dengan pesawat hemat energi.
- Pengembangan transportasi sungai ramah lingkungan untuk wilayah yang dilalui DAS Kayan dan DAS Sesayap.
- Transportasi motorisasi rendah emisi untuk desa pesisir.

Rute Antar-Pulau yang Efisien & Terintegrasi

Kaltara sangat bergantung pada transportasi laut antar pulau. Perlunya:

- Peningkatan armada kapal hemat energi.
- Digitalisasi pelayanan pelabuhan untuk mempercepat bongkar muat.
- Integrasi rute Tarakan–Nunukan–Sebatik–Tanjung Selor yang lebih terjadwal dan terkoordinasi.

Ini akan memperkuat konektivitas sosial ekonomi serta mempercepat aliran barang ke Malaysia dan Sulawesi.

Ekosistem Kendaran Listrik (EV) yang Realistis dan Bertahap

Implementasi EV di Kaltara dapat dimulai dengan:

- Kendaraan dinas daerah berbasis listrik.
- Motor listrik untuk ojek online.
- Shuttle listrik untuk bandara, kawasan industri, dan pelabuhan.
- SPKLU dan SPBKLU terintegrasi di Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, dan Nunukan.

Adanya energi terbarukan dari PLTA adalah nilai tambah besar yang bisa menjadi branding Kaltara sebagai provinsi pelopor mobilitas rendah karbon di Kalimantan.

Dampak yang diharapkan dari mobilitas berkelanjutan di Kaltara adalah biaya logistik turun sehingga mendukung daya saing industri dan UMKM, kualitas udara di Tarakan dan Tanjung Selor membaik karena pengurangan kendaraan berbahan bakar fosil, akses penduduk pedalaman meningkat terutama melalui transportasi udara dan sungai yang efisien, pembangunan KIPI semakin hijau sejalan dengan visi industri hijau Indonesia, serta kesiapan menghadapi 2045 ketika Indonesia menargetkan emisi karbon rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Mobilitas berkelanjutan bukan sekadar modernisasi transportasi, ini adalah strategi pembangunan jangka panjang. Kaltara dengan energi hijau, kedudukan strategis di perbatasan, dan pusat pertumbuhan baru memiliki peluang besar menjadi model mobilitas berkelanjutan di Kalimantan dan Indonesia. Dengan menyelaraskan RPJPN dan RPJMN ke dalam konteks lokal, Kaltara dapat membangun sistem konektivitas yang efisien, inklusif, terjangkau, dan ramah lingkungan, menuju visi Kaltara Maju, Hijau, dan Terkoneksi 2045.(RSL)

[1] Penelaah Teknis Kebijakan, Bappeda dan Litbang Kaltara



Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan, berkunjung ke Kantor Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, membahas peluang kolaborasi, penguatan roadmap penelitian, dan penyelarasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada isu prioritas daerah, terutama di sektor energi. (10/12)



Plt. Kabid. Perekonomian dan SDA, Dian Suryanata menjadi narasumber pada Rakerda PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Rakerda ini memiliki arti strategis sebagai forum untuk menyusun arah kebijakan, program dan langkah kerja PKK yang selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kaltara. (14/12)





Bappeda dan Litbang Kaltara berhasil meraih peringkat kedua dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemprov. Kaltara Tahun 2025. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Bappeda dan Litbang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. (16/12)



Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius, S.Hut, menjadi narasumber pada FGD Sinergi Triple Helix Untuk Mewujudkan Ekosistem Inovasi dan Kewirausahaan Kalimantan Utara. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UPT Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan. (7/11)



Telajah Santai di Hutan Pinus Tideng Pale

Siapa bilang liburan harus jauh dan mahal? Di jantung Kabupaten Tana Tidung, tepatnya di Tideng Pale, ada destinasi alam yang cocok buat kamu yang ingin "ngadem". Namanya? Hutan Pinus Tana Tidung.

Hutan pinus ini jadi favorit para pelancong yang sekadar ingin beristirahat sejenak. Begitu memasuki kawasan, hamparan pohon pinus yang menjulang langsung menyambut dengan kesejukan alami. Udara segar, pemandangan bukit berundak, dan suara alam yang menenangkan bikin stres langsung "kabur"!

Yang paling seru? Masuknya gratis! Tidak ada tiket masuk, tidak ada biaya tersembunyi. Cukup bawa bekal dari rumah karena di sini belum ada warung UKM dan siapkan kamera, karena spot-spot di sini *super instagramable!*





"Tempat ini jadi favorit anak muda buat foto-foto. Pemandangannya keren, *background*-nya rapi, dan suasananya bikin mood naik," ujar salah satu pengunjung yang sedang asyik ber-swafoto bersama temannya.

Taman ini sudah dilengkapi gazebo berwarna hijau yang tersebar nyaman di antara pepohonan. Untuk menuju spot utama, pengunjung bisa melintasi jembatan ulin selebar 1,5 meter kuat, alami, dan khas Kalimantan. Di ujung jembatan, kamu akan disambut panggung tiga tingkat berbentuk setengah lingkaran dengan latar tulisan besar berwarna merah: "Hutan Pinus".

Spot ini bukan cuma keren buat foto, tapi juga jadi titik terbaik untuk menikmati panorama Tideng Pale serta sungai Sesayap yang meliuk indah yang memanjakan mata.

Jadi, buat kamu yang sedang road trip di Kalimantan Utara, jangan lewatkan mampir ke Hutan Pinus Tideng Pale. Liburan singkat, hati senang, kantong pun tetap aman karena semuanya di sini gratis dan ramah keluarga!



MENGENAL TOKOH *URBAN LEGEND* DARI KALTARA (BAGIAN 3)

[Penulis : Ida Ayu Parlina[1]]

Uy, Peradi!

Kenalkan namaku Andau, aku berasal dari bagian utara pulau Borneo. Tidak seperti rekan-rekan dari dunia kegelapan lainnya, tidak banyak orang yang mengenalku. Misalkan disebut nama Bilau mungkin banyak orang yang mengingatnya. Begitu pula jika disebut nama Jerenun, kemungkinan masih banyak orang yang tahu sosok hantu air tersebut, meski sungai Kayan tak lagi jernih, meski anak-anak tak tertarik bermain di sungai lagi, namun sosok Jerenun masih bisa bikin merinding para gen-x, terutama yang bernasib sial pernah melihat wujudnya.

Aku berasal dari generasi yang lebih tua, beberapa orang *boomers* kemungkinan masih ada yang mengingatku, mungkin pula diantara para sesepuh itu ada yang pernah menceritakan kisahku kepada anak-anak dan cucunya, sehingga namaku masih tersisa di memori segelintir orang. Orang-orang yang pernah tinggal di ladang-ladang sepi, di hutan-hutan angker atau di kebun-kebun tua. Kini kisahku hanyalah sekeping memori yang semakin lama semakin memudar, seiring dengan tumbangnya pohon-pohon di belantara.

Sebuah kisah yang tersingkir seiring tergusurnya para penghuni rimba raya dari habitatnya. Jika tak kuceritakan sekarang, kelak tiada lagi yang mengetahui eksistensiku. *So my Peradi, sit next to me, let me tell you my story.*



Aku pernah hidup di abad ke-18. Kala itu usiaku 15 tahun lebih beberapa bulan. Aku adalah anak pertama dari tiga orang bersaudara. Pekerjaanku adalah petani. Mulanya aku bekerja sebagai pembantu bapakku menggarap ladang kami. Tapi sejak beberapa bulan lalu aku dipercaya menggarap sebidang tanah milikku sendiri. Sejak kecil aku dan adikku yang laki-laki sudah terbiasa mengikuti bapak kemana-mana. Bapak ke ladang kami ikut ke ladang, sehingga kami tahu cara bercocok tanam.

Bapak ke hutan kami pun ikut masuk hutan, sehingga kami mengenal beberapa jenis tanaman

berharga, tahu cara berburu dan rahasia agar tidak tersesat di belantara. Bapak ke sungai kami pun turut masuk ke danum, sehingga kami tahu cara menangkap ikan dan memasaknya dengan buah perangat agar tidak amis.

Itulah peran bapak dalam hidupku, kelak jika aku menjadi orang tua aku juga akan menjadi bapak yang baik seperti dirinya. Tidak muluk-muluk cita-citaku, apalagi di usiaku ini aku sudah dijodohkan, Hal yang lumrah terjadi di masa itu. Aku tidak buru-buru menikah, meski teman-teman sebayaku sudah banyak yang menikah dan memiliki anak. Ibuku pernah mengungkit masalah itu tapi aku diam saja.

Biarlah para orang tua yang mengatur masalah sekrusial itu. Aku percaya ibuku mengetahui yang terbaik bagiku. Masa itu aku sedang *excited* dengan ladang garapanku. Sejak bapak mempercayaiku mengelola lahan sendiri, aku tepacu untuk mendapatkan panen yang berhasil. Masalah pernikahan tidak menjadi prioritas bagiku, sampai pada satu sore yang indah di tepi sungai...

Saat sedang membersihkan diri sepulang dari ladang, aku mendengar teriakan perempuan disusul dengan suara orang jatuh ke air. Di kampungku hampir semua orang terbiasa beraktivitas di sungai, jadi seharusnya gadis yang jatuh itu juga bisa berenang. Benarlah, dia baik-baik saja tapi kerepotan mengumpulkan cucian yang telah berhamburan keluar dari keranjang rotan yang ia bawa.

Aku pun terjun untuk membantunya mengambil kembali beberapa pakaian yang hanyut terbawa arus. Aku berhasil mengumpulkan semua cucian kotor kembali ke dalam keranjang dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Sebuah tindakan kecil yang berdampak besar, ibarat kunci yang membuka babak baru dalam kehidupanku. Gadis yang kubantu memang bukan putri jutawan yang sedang menyamar menjadi tukang cuci, tapi ternyata dia adalah gadis yang telah dijodohkan denganku. Tak seperti drama percintaan yang memiliki alur yang rumit, kisah cintaku sesederhana itu.



Cinta boleh sederhana, tapi persiapan perkawinan istimewa. Uang hasil panen bapak dan uangku dijadikan satu pun tidak cukup untuk membiayai semua. Aku perlu penghasilan tambahan. Aku harus keluar kampung untuk menjual hasil hutan, seperti madu dan gaharu. Ibuku juga membutuhkan beberapa barang yang tidak tersedia di kampung kami.

Akhirnya, berdasarkan hasil perundingan kedua keluarga, aku dan bapak akan bergabung dengan rombongan pedagang ke negeri seberang. Para pria di kampung kami sudah terbiasa melakukan perjalanan jauh, termasuk bapakku. Sedangkan bagiku ini adalah kali pertama. Dulu setiap kali bapak pergi aku menjaga ibu dan adik-adikku, kali ini adikku yang memikul tanggung jawab itu, sehingga aku dapat menyambut pengalaman baru. Perjalanan dagang itu memakan waktu lama. Jarak yang jauh, medan yang berat dengan kondisi keamanan juga sangat rawan.

Pada masa itu keributan antar kelompok, hingga perang antar suku biasa terjadi di luar sana. Situasi di kampung kami memang tergolong cukup aman. Aku tak pernah terlibat dalam perkelahian apalagi perang. Aku hanya mengetahui adanya perang dari cerita orang, cerita-cerita perang yang mengerikan. Dari cerita-cerita itu timbul rasa simpatiku terhadap para korban. Betapa aku mendambakan dunia yang damai.

Tak terbayangkan tanganku mengayunkan mendau ke tubuh manusia lain. Tetapi hidup di jaman itu 'siapa yang kuat dia yang berkuasa', mentalku telah disiapkan untuk menghadapi situasi buruk yang mengancam nyawa.

Hari keberangkatan pun tiba, menyadari kami akan berpisah dalam waktu yang lama, malam itu kami tidur bersama di ruang tengah. Satu lampu minyak di atas meja dibiarkan tetap menyala. Cahayanya bergoyang dihembus angin yang masuk melalui sela-sela dinding papan yang jarang. Ada sebuah kepercayaan dari suku kami, yaitu pantang bagi dua orang atau lebih yang tinggal di bawah satu atap melakukan perjalanan pada hari yang sama tapi menuju arah yang berbeda.



Misalnya ada dua orang dalam satu rumah yang akan berpergian, satu orang bertujuan ke arah hilir sungai sedangkan satu lagi menuju ke hulu sungai. Pada kondisi itu, maka salah satu harus mengalah dengan menunda kepergiannya di keesokan hari.

Pada kondisi kedua perjalanan tidak dapat ditunda, maka salah satu orang terpaksa bermalam di rumah lain. Apabila pantangan itu dilanggar salah satu atau keduanya atau penghuni rumah lainnya dipercaya akan mendapat celaka.

Ketika pantangan tak sengaja dilanggar, untuk menebusnya harus melakukan ritual Bila Bulu yaitu ritual tolak bala dengan membelah bambu agar pelaku perjalanan dan penghuni rumah tidak ditimpa bencana. Begitulah kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat kami. Dalam hal ini, aku dan bapakku tidak melanggar pantangan karena kami memiliki arah dan tujuan perjalanan yang sama, diharapkan perjalanan kami akan lancar-lancar saja hingga kami kembali ke rumah dengan selamat.

Pagi itu setelah sarapan, aku dan bapakku melangkah ke terunan (dermaga) yang menjadi titik kumpul orang-orang yang akan mangkat (berpergian). Dalam perjalanan itu kami akan menaiki perahu ke satu tempat untuk menjual sebagian barang dagangan yang kami bawa, lalu dari sana kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke tempat tujuan utama. Satu-satunya sarana transportasi yang tersedia adalah perahu atau kapal.

Manusia berencana, berusaha dan berdoa tetapi ada kalanya kenyataan tak seindah harapan. Singkat cerita, dalam perjalanan itu tak disangka-sangka kami terjebak dalam sebuah konflik berbahaya. Rombongan kami tiba-tiba diserang oleh sekelompok laki-laki bersenjata. Tentu saja kami berusaha membela diri dan sekuat tenaga mempertahankan barang-barang milik kami, tapi malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih. Dibandingkan dengan para penyerang itu kami kalah dalam segala hal.

Baik dari jumlah orang, senjata, maupun pengalaman. Posisi kami terdesak, aku yang terluka parah mundur ke sebuah rumpun bambu, di situlah lawan mengayunkan pedangnya untuk menebasku, aku menahan nafas, jantungku berpacu tak menentu, aku memejamkan mata pada detik terakhir, selanjutnya hanya kegelapan.

Ketika akhirnya aku membuka mata, tubuhku basah tergeletak di bawah rumpun bambu. Suasana sepi, hanya suara orang berbicara semakin lama semakin menjauh. Aku melihat orang-orang yang menyerang kami melangkah pergi. Sekilas aku melihat lawan duelku tadi, dia juga terluka di bagian dada.

Dia membungkuk untuk memungut sesuatu lalu melenggang pergi. Darah menetes dari benda yang ditentengnya itu. Itu adalah kepalaku, ya kepalaku. Dia membawa pergi kepalaku. Aku bertekad untuk

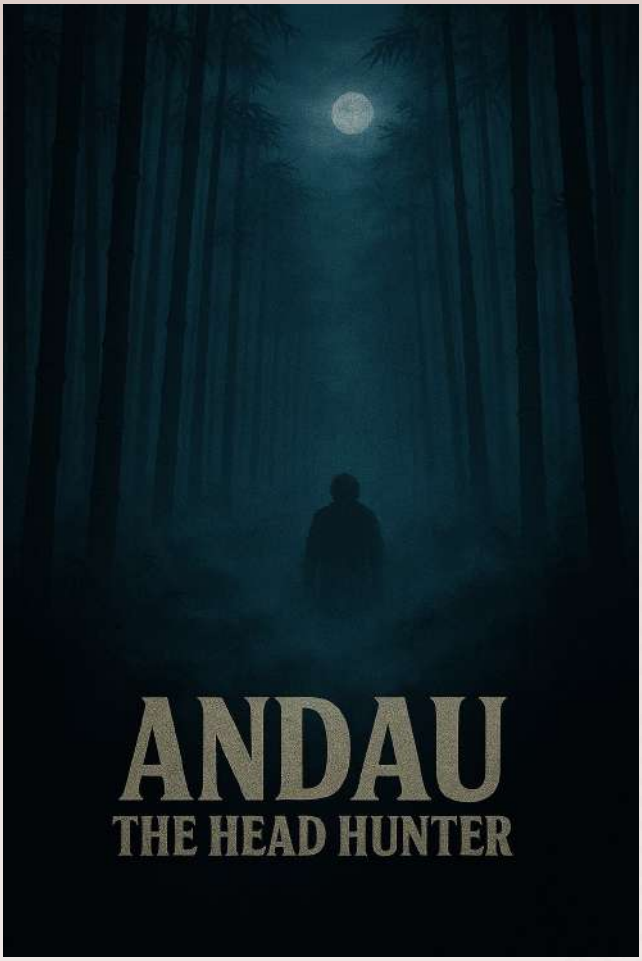
mengambilnya kembali.
***

Andau yang malang, konon hingga hari ini dia masih mencari kepalanya. Dia berkelana di hutan, ladang dan kebun untuk mencari kepalanya. Beberapa kali ia berusaha bertanya pada orang yang ditemuinya, namun setiap kali pula ia kecewa. Orang yang ditemui Andau selalu pergi meninggalkannya, ada yang pingsan, ada pula yang kemudian jatuh sakit, tak berani lagi kembali ke lokasi Andau menampakkan wujudnya.

Andau sedih namun Andau tidak putus asa. Menurut pemikiran Andau yang polos, jika kepala dan tubuhnya dapat disatukan kembali, maka ia pun dapat kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarganya dan menemui tunangannya. Andau ingin melangsungkan pernikahan. Andau ingin membina rumah tangga. Andau ingin menjadi suami yang penyayang, menjadi bapak yang bertanggung jawab, menjadi petani yang berhasil. Cita-cita Andau sederhana, tapi mustahil diwujudkan oleh makhluk tanpa kepala.

Konon, menyadari orang-orang enggan berjumpa dengannya Andau pun segan menampakkan wujudnya. Kehadirannya hanya bisa disadari melalui runduknya rerumputan dan tumbuhan yang dilaluinya. Langkah-langkah kakinya membekas namun tiada wujudnya. Ibarat angin yang berhembus, menyibak batang-batang padi, begitulah Andau melintasi ladang. Tempat yang paling disukainya adalah rumpun bambu, di rumpun bambu dia dieksekusi. Di bawah teduhnya daun-daun bambu nasib malang ia renungi.

Andau hanyalah seorang pemuda lugu yang berada di waktu dan tempat yang salah. Dia tidak merugikan orang lain. Dia tak berkonflik dengan siapa pun. Namun dia harus meregang nyawa dengan cara yang tragis. Andau tak pernah mengetahui identitas orang-orang itu. Apakah mereka para pemburu kepala ataukah perampok biasa yang mengambil kesempatan dari sebuah konflik. Sungguh Andau pun tidak begitu peduli, dia hanya menginginkan kepalanya kembali.



Di masa Andau hidup tradisi berburu kepala (Ngayau) masih ada. Orang-orang menebas leher orang lain, lalu membawa kepala-kepala itu pulang untuk dijejerkan ibarat koleksi piala. Sebuah cara pembuktian keberanian, kekuatan dan kejantanan yang sangat ekstrem.

Apakah Andau salah satu korbannya? Entahlah. Kisah itu terjadi dua abad yang lalu. *Let bygones be bygones,* yang lalu biarlah berlalu, apalagi tradisi Ngayau sudah diakhiri dengan kesepakatan damai yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Tumbang Anoi pada tahun 1894. Jadi bagaimana peradi, apakah kamu berani jika Andau mengajakmu berkomunikasi?

[1] Pegiat Literasi

#bangga melayani bangsa
BerAKHLAK

SELAMAT DAN SUKSES

Atas Inovasi

Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif (SIBATIK)

Sebagai

Outstanding Public Service Innovations (OPSI)
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025

Oleh

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI,

RINI WIDYANTINI, S.H., M.P.M

Kepada

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum

Jakarta, 15 Desember 2025

Tertanda

Bertius
Kepala Bappeda & Litbang
Provinsi Kalimantan Utara



#bangga melayani bangsa
BerAKHLAK

SELAMAT ATAS PENCAPAIAN

PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2025



Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara meraih Peringkat ke-2

KATEGORI

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
serta Meraih Predikat

"Menuju Informatif"

Bappedalitbangkaltara | @Bappedalitbangkaltara | BappedadanLitbang Prov.Kalimantan Utara | bappedalitbang.kaltaraprov.go.id

#bangga melayani bangsa

#BerAKHLAK

Segenap Keluarga Besar Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara Mengucapkan,

SELAMAT NATAL & TAHUN BARU 2026

Selamat hari Natal dan Tahun Baru,
Semoga tiap detik kita dihiasi
keindahan dan kedamaian.



BERTIUS, S. Hut
Kepala Bappeda dan Litbang